

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATANBAGAN
SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Zarinah

NPM : 157110173

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ANALISIS PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK

Zarinah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini yaitu : Perencanaan, Pembagian Kerja, Komunikasi dan Pertemuan. Perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Koordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir?. Lokasi penelitian ini yaitu Kantor Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Populasi pada penelitian ini adalah Perangkat Kecamatan, Ketua LPM sekecamatan dan Kepala Desa yang berjumlah 18 orang dan Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berjumlah 40 orang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan Pelaksanaan Koordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Cukup Terlaksana. Adapun hambatan dalam Pelaksanaan Koordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yaitu, koordinasi antara pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kurang baik, kurang kompetennya pegawai di kantor desa, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan Bagan Sinembah, kurang jelas dan kurang optimalnya informasi yang diberikan kantor camat serta desa mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci : Pelaksanaan, Koordinasi, Pemberdayaan Masyarakat

ANALYSIS OF COORDINATION IMPLEMENTATION IN COMMUNITY EMPOWERMENT ACTIVITIES IN DISTRICT BAGAN SINEMBAH, ROKAN HILIR DISTRICT

ABSTRACT

Zarinah

This study aims to determine the implementation of coordination in community empowerment activities in Bagan Sinembah District, Rokan Hilir Regency. As for the benchmarks in this study, namely: Planning, Division of Work, Communication and Meetings. The formulation of this research problem is How is the Implementation of Coordination in Community Empowerment Activities in Bagan Sinembah Subdistrict, Rokan Hilir Regency? The location of this study is the Bagan Sinembah Sub-District Office, Rokan Hilir Regency. The population in this study was the Sub-District Apparatus, the Chairperson of the LPM of the sub-district and the Village Head of 18 people and the Community Participating in the Community Empowerment Activity of 40 people. The results of this study concluded that overall the Implementation of Coordination in Community Empowerment Activities in Bagan Sinembah Subdistrict, Rokan Hilir District was Fairly Done. As for the obstacles in the Implementation of Coordination in Community Empowerment Activities in Bagan Sinembah Subdistrict, Rokan Hilir Regency, namely, poor coordination and implementation of community empowerment activities, lack of competence of employees in the village office, Lack of community participation in community empowerment activities in Bagan Sinembah sub-district, unclear and less clear optimal information provided by the sub-district office and the village regarding community empowerment activities.

Keywords: Implementation, Coordination, Community Empowerment

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir”**

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal ini penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Pada kesempatan yang baik ini tak lupa penulis menyampaikan Terimakasih yang setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu memberikan bimbingan selama perkuliahan.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. H. Moris Adidi Yogia., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak M. Faisal Amrillah.,S.Sos.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dukungan serta motivasi sepenuhnya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat disebutkan Nama dan Jabatannya satu persatu, yang telah mendidik, memberikan ilmu dan memberikan dorongan serta arahan selama Perkuliahan.

7. Seluruh staf Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada Penulis selama mengikuti pendidikan pada Prodi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
8. Ibu Sakinah, S.STP.,M.Si., selaku Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Ibu pegawai Kantor Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Ketua LPM Se Kecamatan Bagan Sinembah, dan Kepala Desa Se Kecamatan Bagan Sinembah serta instansi lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih saya ucapkan karena telah membantu penyelesaian Skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
9. Terimakasih kepada Ayahanda terkasih dan Ibunda tersayang Ani Dewi Astuti atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terimakasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan ku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.
10. Kakak, dan adik tersayang tersayang Mazidah, Susi Lawati, dan Farid Gunawan.
11. Terimakasih kepada abangku Tersayang Edi Hermansyah, Topit Rizaldi yang tidak pernah henti memberikan semangat, motivasi, dan doa.
12. Sahabat terbaik penulis: Triyana Sary, Anggi Puspitasary, Tiara, Lesvina Elsa, yang selalu memberikan dukunngan, nasehat dan hiburan kepada penulis.

13. Teman-teman seperjuangan AP angkatan 2015 yang tak bisa namanya disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semuanya, hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keihlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 22 September 2019

Penulis,

Zarinah



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian	24
D. Kegunaan Penelitian	24
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepuustakaan	25
1. Konsep Administrasi	25
2. Konsep Organisasi	27
3. Konsep Manajemen	31
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	33
5. Konsep Koordinasi	34
B. Kerangka Pikir	43
C. Hipotesis	45
D. Konsep Operasional	45
E. Operasional Variabel	46
F. Teknik Pengukuran	49
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi Penellitian	53
C. Populasi dan Sampel	54
D. Teknik Penarikan Sampel	55
E. Jenis dan Sumber Data	55
F. Teknik Pengumpulan Data	56
G. Teknik Analisi Data	57
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	58
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir	58
B. Gambaran Umum Kecamatan Bagan Sinembah	59
C. Gambaran Umum Kantor Camat Bagan Sinembah	61

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	63
B. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	69
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR KEPUSTAKAAN	115
LAMPIRAN	118



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Daftar jumlah perkembangan penduduk pada Desember 2018 Kecamatan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	7
II.1	Operasional Variabel Analisis Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	48
III.3	Tabel Populasi dan Sampel Penelitian	55
III.2	Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian	58
V. 1	Identitas Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM sekecamatan dan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
V. 2	Identitas Responden Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Berdasarkan Jenis Kelamin.....	64
V. 3	Identitas Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM sekecamatan dan Kepala Desa pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Umur ..	65
V. 4	Identitas Responden Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah berdasarkan Umur	66
V. 5	Identitas Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM sekecamatan dan Kepala Desa pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Tingkat Pendidikan	67

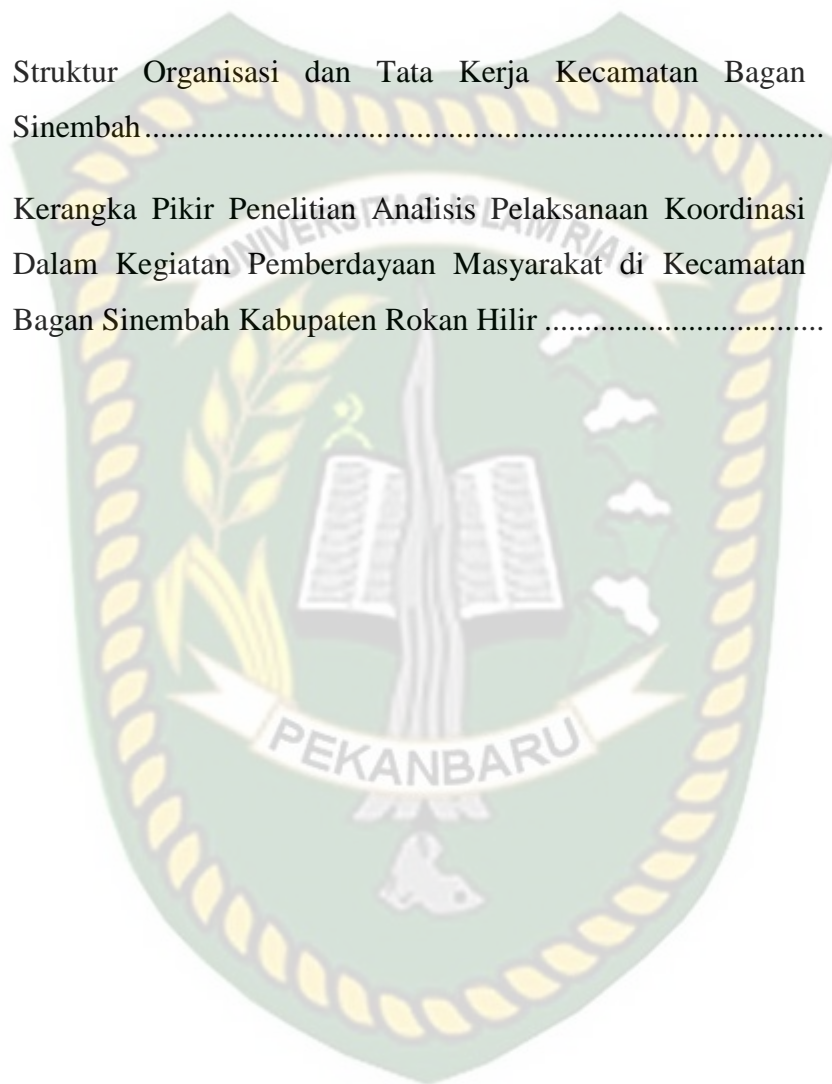
V. 6	Identitas Responden Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah berdasarkan Umur berdasarkan Tingkat Pendidikan	68
V. 7a	Tabel Skor Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Perencanaan pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	70
V. 7b	Analisis Jawaban Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Perencanaan pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	72
V. 8a	Tabel Skor Responden Masyarakat Mengenai Indikator Perencanaan Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	74
V. 8b	Analisis Jawaban Responden Masyarakat Mengenai Indikator Perencanaan Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	75
V. 9a	Tabel Skor Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Pembagian Kerja pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	79
V. 9b	Analisis Jawaban Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Pembagian Kerja pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	81

V. 10a	Tabel Skor Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pembagian Kerja Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	84
V. 10b	Analisis Jawaban Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pembagian Kerja Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	86
V. 11a	Tabel Skor Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Komunikasi pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	90
V. 11b	Analisis Jawaban Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Komunikasi pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	92
V. 12a	Tabel Skor Responden Masyarakat Mengenai Indikator Komunikasi pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	94
V. 12b	Analisis Jawaban Responden Masyarakat Mengenai Indikator Komunikasi pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	96
V. 13a	Tabel Skor Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Pertemuan pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	99

V. 13b	Analisis Jawaban Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Pertemuan pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	101
V. 14a	Tabel Skor Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pertemuan pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	103
V. 14b	Analisis Jawaban Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pertemuan pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	105
V. 15	Rekapitulasi Jawaban Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.....	106
V. 16	Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bagan Sinembah.....	8
II.2 Kerangka Pikir Penelitian Analisis Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Kuesioner Penelitian (Untuk Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa).....	119
2 : Daftar Kuesioner Penelitian (Untuk Masyarakat).....	131
3 : Daftar Wawancara Penelitian (Untuk Camat, Ketua LPM dan Kepala Desa)	144
4 : Rekapitulasi Telly Kuesiober	145
5 : Photo Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian.....	147

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zarinah
NPM : 157110173
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan inisaya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternayata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 September 2019
Pelaku Pernyataan,

Zarinah

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Sesuai dengan amanat UUD NegaraKesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi seluas-luasnya, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,keadilan, keistimewaan dan khususnya serta potensi dan keragaman daerah. Melalui otonomi seluas-luasnya, pemerintah daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggungjawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Administrasimerupakan salah satucabangilmu social, administrasi juga sebagai salah satu

Fenomena atau ciri masyarakat modern, secara eksplisit tergambar administrasi yaitu suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Keseluruhan proses administrasi yang bertitik tolak dari manusia, berorientasi pada manusia, dimaksudkan

Untuk kepentingan manusia dan diakhiri oleh manusia pula, oleh karena dalam menganalisa administrasi, manusia perlumen dapatkan perhatian yang utama.

Seperti yang dimaksudkan Nawawi (dalam Syafie, 2003:5), administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Artinya administrasi merupakan suatu proses dalam melakukan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang dalam mencapai tujuan bersama.

Administrasi tidak terlepas dari organisasi, yang merupakan suatu wadah bagi pemerintah untuk melaksanakan aktivitas kerjasama yang memanfaatkan sumberdaya yang telah ada menggunakan metode-metode tertentu dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Massie (dalam Zulkifli, 2009:14) mengatakan organisasi merupakan suatu kerjasama kelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitas percapai tujuan bersama. Artinya organisasi merupakan sebuah wadah yang didalamnya terdapat orang-orang yang ingin melakukan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Kemudian menurut Hasibuan (2011;85) berpen dapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Artinya koordinasi merupakan suatu kegiatan yang sudah terstruktur dalam unsure manajemen yang bersifat *top down*.

Maka dapat dilihat koordinasi merupakan salah satu kegiatan untuk mencapai segala tujuan organisasi, seperti meningkat kan kualitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan keraktifitas di kecamatan bagan sinembah, yang mana menyatakan kegiatan-kegiatan tersebut, berkomunikasi kepada semua anggota organisasi tersebut seperti berkomunikasi dengan UPK (unsure pemimpin kecamatan bagan sinembah), dimana komunikasi tersebut dilakukan setiap adanya kegiatan yang akan mau dibuat maupun adanya permasalahan yang akan diselesaikan didalam organisasi tersebut. Datuk penguluh tugasnya seperti sebagai penanggung jawaba nggaran UKM yang ngasi anggaran BUMDES, berkomunikasi sepertirapat pada tahun 2018 bersama UPK (unik pelaksanaan teknisdinas, contohnya seperti dinas puskesmas dinas pertanian, dinas pendidikan, dinas pendapatan dan lain-lain.

Dalam bentuk berkomunikasi lasung bertatap wajah seperti berbicara. Yang di bahas dalam berkomunikasi seperti tentang pemberdayaan UKM (usaha kecil menengah) seperti pembuatan batik, batik kelapa sawit maka dari itu koordinasi sangat perlu. Kajian administarsi public ialah tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Salah satu kegiatan untuk mencapai tujuan Negara ialah pembangunan baik dipusat maupun daerah hinga ketinggian desa kalipun.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan pemerintah dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan serta kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Soetomo (2011;69) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya. Sehingga dengan melakukan pemberdayaan oleh pemerintah, masyarakat dapat membangun kehidupannya. Artinya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu praktik pemberian kesempatan besar kepada masyarakat lokal untuk menegaskan sebuah pembangunan.

Salah satu tugas pokok Camat sebagai pemimpin Kecamatan adalah melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pada wilayah Kecamatan yang meliputi dorongan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja yang mempunyai program dan kegiatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan, melakukan evaluasi, berbagai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan, sehingga dapat diketahui bahwa Camat dapat melakukan salah satu fungsi pemerintah yaitu pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat di Kecamatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menjelaskan dalam proses pemberdayaan masyarakat koordinasi dari camat pada wilayah kecamatan

menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di desa yang berada dalam wilayah kecamatan. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di desa oleh camat diperlukannya peran serta aktif dari masyarakat guna mendorong perencanaan pemberdayaan melalui forum musyawarah pembangunan di desa, misalnya dalam pembuatan kebijakan yang ada di desa camat sebagai kepala wilayah di kecamatan mendampingi setiap kepala desa baik dalam pembuatan kebijakan atau peraturan desa. Terlebih saat ini disalurkan dana desa yang di salurkan oleh pemerintahan pusat demi menunjang kegiatan pembangunan serta pemberdayaan yang ada di desa. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi koordinasi berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mensinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif Sugandha, 1998 (Ndraha 2012:250).

Camat sebagai ujung tombak pemerintah daerah secara jelas dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 126 ayat (3) menyatakan bahwa camat menjalankan tugas umum pemerintahan yang dalam pembahasan di atas disebut sebagai kewenangan atributif. Camat diharapkan mampu melihat potensi wilayah yang dimiliki dan ikut bertanggungjawab dan bertugas dalam hal kemajuan masyarakat dan lingkungan wilayah kerjanya. Sesuai dengan arahan PP. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Peranan mendorong partisipasi masyarakat untuk, ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan di kecamatan;
2. Peranan melakukan pembinaan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah yang mempunyai atau melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; dan
3. Peranan melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.

Mengingat Camat selaku kepala pemerintahan atau kepala wilayah dan camat sebagai pegawai negeri pusat yang diperbantukan di wilayah kecamatan, camat dituntut harus mampu mengelola pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan, sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat, dan pemberdayaan yang dilakukan baik dalam mengasah kemampuan skill berusaha dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat desa. Tentunya camat harus dinamis dan kreatif dalam menggerakkan para aparatnya secara berkesinambungan, dimana para aparat mampu menjadi aparatur pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Karena kepemimpinan Camat sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan dan pemberdayaan di desa di wilayah kecamatan.

Lalu dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan pada Pasal 4 ayat 2 poin d yaitu koordinasi pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir, penduduk di Kecamatan Bagan berdasarkan laporan penduduk tahun 2017 dari sekecamatan Bagan Sinembah adalah berjumlah 128.339 jiwa dengan jumlah laki-laki 66.680 dan perempuan 63.635, sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 31.240. Adapun daftar jumlah perkembangan penduduk pada Desember 2018 kecamatan Sinembah kabupaten Rokan Hilir

Tabell.1 : Daftar jumlah perkembangan penduduk pada Desember 2018 Kecamatan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

No	Kelurahan/Kepenghuluan	Total Penduduk
1	Kel. Bagan Batu Kota	13379
2	Kel. Bahtera Makmur Kota	4197
3	Kep. Bagan Batu	9993
4	Kep. Bahtera Makmur	4462
5	Kep. Pelita	1821
6	Kep. SukaMaju	1059
7	Kep. Gelora	2093
8	Kep. Bagan Manuggal	2472
9	Kep. Bagan SaptaPermai	1701
10	Kep. Bakti Makmur	4929
11	Kep. Jaya Agung	1822
12	Kep. Bhayangkara Jaya	909
13	Kep. Meranti Makmur	1439
14	Kep. Bagan Batu Bara	5869

15	Kep. Jadi Makmur	2023
16	Kep. Murni Makmur	2354
17	Kep. Bakti Jaya	1462
Jumlah		61984

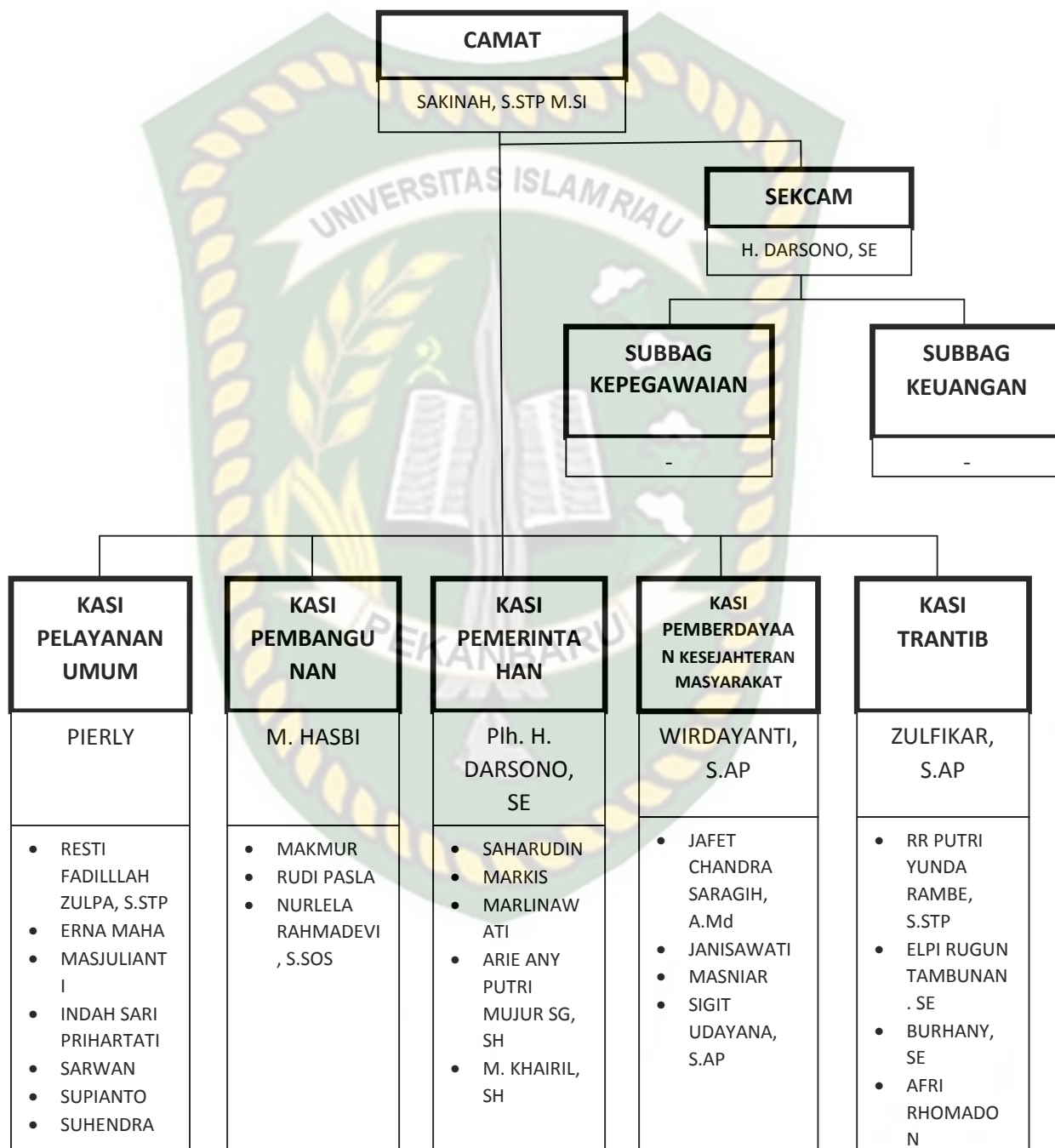
Sumber: Kantor Camat Bagan SinembahRokanHilir, 2019

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 1.I sebagai berikut



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH

Gambar I.1 : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018



Sumber Perda Kabupaten Rokan Hilir 2007

Berikut ini tugas pokok dan fungsi struktur organisasi Kantor Kecamatan Bagan Sinembah berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 66 Tahun 2016 yaitu:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan juga kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten;
- b. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Pengkoordinasian Penerapan dan penegakan perundang - undangan;
- e. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum;
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan atau Kelurahan;
- h. Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, keuangan, kepegawaian, asset, perlengkapan dan perencanaan.

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian keuangan dan aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Sekretaris kecamatan. Sub Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas pokok dalam penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan aset mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan administrasi Keuangan, penyusunan Rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
- c. Pengelolaan pembinaan dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;

- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas;
 - e. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah;
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan;
 - h. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan dan aset;
 - i. Pelaksanaan pengkoordinasi pengelolaan keuangan dan aset
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

SubBagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan dinas dan infestarisasi dan prasana dinas, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dibidang urusan umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan kesektarian;
- c. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;

- e. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya;
 - f. Pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan kantor kecamatan;
 - g. Pengurusan eksploitasi dan pemeliharaan kendaraan dinas;
 - h. Pengadaan perlengkapan dan perbekalan;
 - i. Penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian perlengkapan dan perbekalan;
 - j. Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
 - k. Pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan serta pengurusan administrasi inventarisasi kekayaan milik Negara ;
 - l. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas;
 - m. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas ;
 - n. Pengelolaan system informasi manajemen perlengkapan;
 - o. Pengelolaan perpustakaan dinas dan hubungan masyarakat;
 - p. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian
5. Seksi Pelayanan Umum
- a. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
 - b. Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasai dan pelaporan Pelayanan Umum.

6. Seksi Pembangunan

- a. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perekonomian dan pembangunan;

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian Desa/Kelurahan, koperasi, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup.

7. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- b. Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembinaan Pemerintahan desa/Kelurahan, administrasi Kependudukan dan catatan Sipil, Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatan serta Pertanahan.

8. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat

- a. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- b. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Masyarakat Sosial dan Budaya;

Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelayanan sosial dan bantuan sosial Pembinaan kepemudaan dan olah raga, peranan wanita, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, tenaga kerja dan kesehatan masyarakat.

9. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;

Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan Pembinaan Polisi Pamong Praja.

Berikut ini merupakan program – program Kecamatan Bagan Sinembah dalam pemberdayaan masyarakat :

1. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pemerintahan Desa

Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di

pemerintahan desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dipemerintahan desa dalam membangun serta memajukan desa.

1. Pemilihan Kepala Desa
 2. Pemilihan BPK
 3. Pembuatan Peta Wilayah
 4. Pembuatan Monografi Data-data Pendudukan
 5. Menjalankan Produk Pemerintah di desa-desa dan kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kelembagaan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini yaitu pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. Contoh meningkatkan fasilitas jalan, sekolah, puskesmas. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pembangunan. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan mitra pemerintah desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan pembangunan sosial ke masyarakatan.

3. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini

mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDES, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini yaitu berupa:

1. Pelatihan,
workshop (Pelatihan keterampilan bekerja atau berusaha bagi kaum wanita yang dilaksanakan melalui organisasi PKK)
2. Pemodalan/permodalan,
3. Bantuan alat produksi,
4. Peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi)

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi merupakan program pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. Bentuk program pemberdayaan ini berupa pelatihan, pengembangan teknologi, dan penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi diharapkan dapat

meningkatkan daya saing masyarakat, memudahkan masyarakat dalam bekerja, serta memudahkan masyarakat untuk berbagi dan mendapatkan informasi.

5. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

6. Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini berupa:

1. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan,
2. Promosi dan penyuluhan program kesehatan,
3. dan membangun desa siaga.

Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

6. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah kecamatan Bagan Sinembah dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini yaitu:

1. Pelatihan guru,
2. Peningkatan sarana dan prasarana,
3. Bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu,
4. Beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain.

Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dan kompeten.

7. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pelayanan Umum

Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pelayanan Umum merupakan program pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam bidang Administrasi. Bentuk program dari pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan umum yaitu:

1. Pelayanan KTP,
2. Pembuatan Kartu KK,
3. Akte Kelahiran,
4. Surat Pindah,
5. Surat Kematian,
6. Rekomendasi Pernikahan,
7. Rekomendasi Surat Izin Usaha,
8. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan,
9. Rekomendasi Hiburan Masyarakat dan lainnya.

8. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan

Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan merupakan program pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah dalam meningkatkan dan pemerataan pembangunan fasilitas umum. Adapun bentuk dari Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan yaitu:

1. Pembangunan jalan dengan pengaspalan dan semenisasi,
2. Pembuatan Gapura
3. Pembuatan Saluran Air
4. Pembuatan Jembatan
5. Pembuatan Irigasi
6. Pembuatan Kantor Desa
7. Pembuatan Pasar

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Bagan Sinembah seringkali kurang mendapat respon dan perhatian oleh masyarakat setempat. Terbukti dari jumlah penduduk yaitu 61.984 orang, yang ikut dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya 50 orang penduduk. Tidak sampai 1% dari total jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi kepala desa, aparatur desa dan instansi terkait dengan camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah.

Bentuk koordinasi yang dilakukan Camat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat biasanya berupa rapat atau pertemuan kecil dengan instansi

terkait. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti :

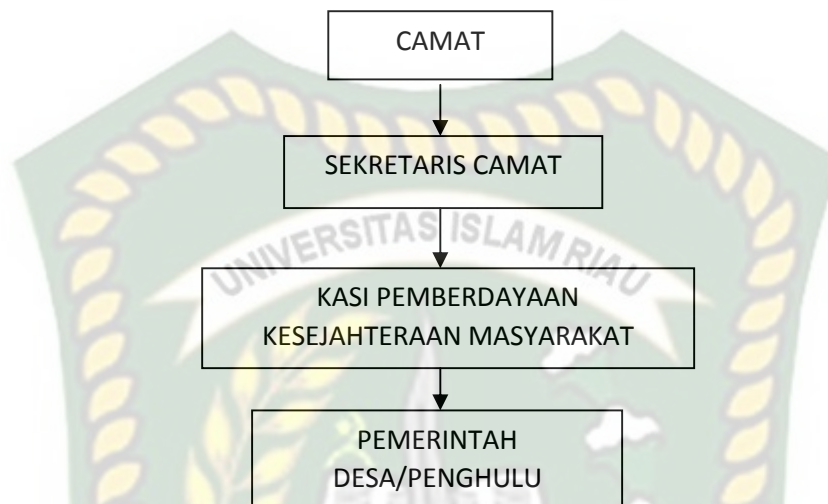
- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikutserta dalam perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan dan kecamatan.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan atau swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Pemerintah desa/pemerintah di desa dan serta wewenang kekuasaan dan pelimpahan dari pemerintah di atas (kabupaten atau kota) seperti pembangunan jalan, desa tidak perlu pemerintah dari atas karena mereka mempunyai kewenangan sendiri

Dan dalam koordinasi ini dilakukan oleh Camat, kelurahan dan pengulu kampung, pemerintah swasta. Tugas pengulu kampung menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, pemberdayaan masyarakat, menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat.

Adapun alur koordinasi yang dilakukan Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu:

Gambar I.2 : Bagan Struktur Organisasi di Kecamatan Bagan Sinembah Rokan Hilir



Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa koordinasi Camat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu Camat menyampaikan kepada Sekretaris untuk mengumpulkan Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Penghulu kampung, dan pihak swasta yang mempunyai program kerja pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di ruang lingkup kecamatan, untuk menghadiri forum/rapat yang dilaksanakan setiap bulannya pada minggu pertama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dapat dijelaskan lagi bahwa Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;

Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Masyarakat Sosial dan Budaya, dalam

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelayanan sosial dan bantuan sosial Pembinaan kepemudaan dan olah raga, peranan wanita, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, tenaga kerja dan kesehatan masyarakat serta seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan membuat laporan kepada camat setiap bulannya yang berasal dari kepala desa.

Dalam PP No. 43 Tahun 2014 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa,

Pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat.

Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat camat selalu melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap unit kerja pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

Koordinasi dilakukan secara langsung dengan masyarakat setempat dan melakukankerjasamadenganinstansiterkait serta pemerintah. Berbagai macam pengelola kerajinan dikumpulkan disuatu tempat guna untuk memberikan pengarahannya serta pembelajaran dalam mengelola kerajinan untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta mendapatkan nilai jual yang tinggi disetiap produk yang dihasilkan.

Kaitan koordinasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini berguna untuk melakukan komunikasi, dengan cara menghubungi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan acara kegiatan pemberdayaan kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga terjalinnya kerjasama yang baik untuk mengsucceskan kegiatan yang telah dibuat dan juga tercapai tujuan dari kegiatan tersebut.

Dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah :



Pembuatan batik



Pembuat kerajinan tangan



Pembutan budi jamur



Pembuatangulaaren

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatpemerintah Kecamatan Bagan Sinembah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat (seperti pelayanan KK, KTP, UUG, IMB, Akta Kelahiran dan sebagainya) masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain

dari banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan dunia usaha dari hasil observasi peneliti dilapangan yang mengungkapkan keluhan masyarakat berupa keberatan terhadap biaya pengurusan KTP di Kecamatan Bagan Sinembah. Fakta lainnya adalah hasil Laporan Observasi Lapangan yang menyimpulkan bahwa pengelolaan produk layanan penerbitan KTP oleh Kecamatan Bagan Sinembah tahun 2018 belum optimal, hal ini terbukti dari data 37.398 wajib KTP, hanya 7.796 atau 20,84% penduduk memiliki KTP. Selanjutnya pengelolaan layanan izin gangguan dan izin mendirikan bangunan juga belum optimal, hal ini terbukti dengan tidak terdapatnya data yang akurat tentang kepemilikan izin gangguan dan IMB oleh masyarakat yang memanfaatkan ruang publik untuk kegiatan usahanya.

Pengaduan lainnya seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit dalam pengurusan, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Menurut peneliti berdasarkan survey dilapangan sosialisasi mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dilakukan secara berkala kepada masyarakat. Dan masalah lain yang ditemukan di desayaitukurangny apengetahuan paraturdesa di bidang teknologi dan informasi dan berdampak pada kurangny akualitas aparaturdesa. Karena latar belakang pendidikan aparatur desa yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah sebagian besar tamatan SMA yang mana

mereka dapat bekerja di Kantor Desa karena ada kerabat yang bekerja disana atau karena ada orang dalam.

Selanjutnya pada Tahun 2018, Desa Bagan Sinembah mendapat bantuan berupa program dari Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia. Yakni, program pelatihan pengembangan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, BRG juga memberi bantuan program mini demplot yakni proyek percontohan pertanian di lahan gambut dengan sistem pengelolaan tanpa bakar. Namun pada kenyataannya pembakaran lahan gambut sampai saat ini masih terjadi di kabupaten Rokan Hilir, terbukti pada tahun 2017 sekitar 9 hektar lahan gambut di kecamatan bagan sinembah terbakar. Dan pada tahun 2019 lahan gambut yang terbakar di kecamatan Bagan Sinembah sekitar 20 Hektar. Kemudian berdasarkan observasi peneliti dilapangan banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang adanya program dari BRG tersebut.

Dari pemaparan latar belakang di atas, hasil prasarvey yang penulis lakukan, dapat diketahui fenomena yang terjadi yaitu:

1. Masih kurangnya pemberian informasi mengenai berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan Bagan Sinembah yang dilakukan oleh Camat kepada Pemerintah Desa, lembaga Desa dan masyarakat Desa yang ada di Bagan Sinembah sehingga masyarakat kurang mengetahui mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan.
2. Kurang terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pelayanan Umum terbukti dengan pengelolaan produk layanan penerbitan KTP oleh

Kecamatan Bagan Sinembah tahun 2018 belum optimal, hal ini dapat dilihat dari data 37.398 wajib KTP, hanya 7.796 atau 20,84% penduduk memiliki KTP. Selanjutnya pengelolaan layanan izin gangguan dan izin mendirikan bangunan juga belum optimal, hal ini terbukti dengan tidak terdapatnya data yang akurat tentang kepemilikan izin gangguan dan IMB oleh masyarakat yang memanfaatkan ruang publik untuk kegiatan usahanya.

3. Tahun 2018, Desa Bagan Sinembah mendapat bantuan berupa program dari Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia. Yakni, program pelatihan pengembangan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, BRG juga memberi bantuan program mini demplot yakni proyek percontohan pertanian di lahan gambut dengan sistem pengelolaan tanpa bakar. Namun pada kenyataannya pembakaran lahan gambut sampai saat ini masih terjadi di kabupaten Rokan Hilir
4. Kurang baiknya koordinasi antara camat dan pemerintah desa, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat belum berjalan dengan baik.
5. Kurangnya respon masyarakat terhadap program kegiatan pemberdayaan masyarakat semua itu terjadi karena Sosialisasi mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dilakukan secara berkala, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dari fenomena yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan meningkatkan tjudul **“Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir”**.

B. RumusanMasalah

Berangkat dari fenomena sebagai mana ditemukan dan telah dijelaskan diatas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagai manakah Pelaksanaan Koordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir?”.

C. Tujuan dan ManfaatPenelitian

1. TujuanPenelitian

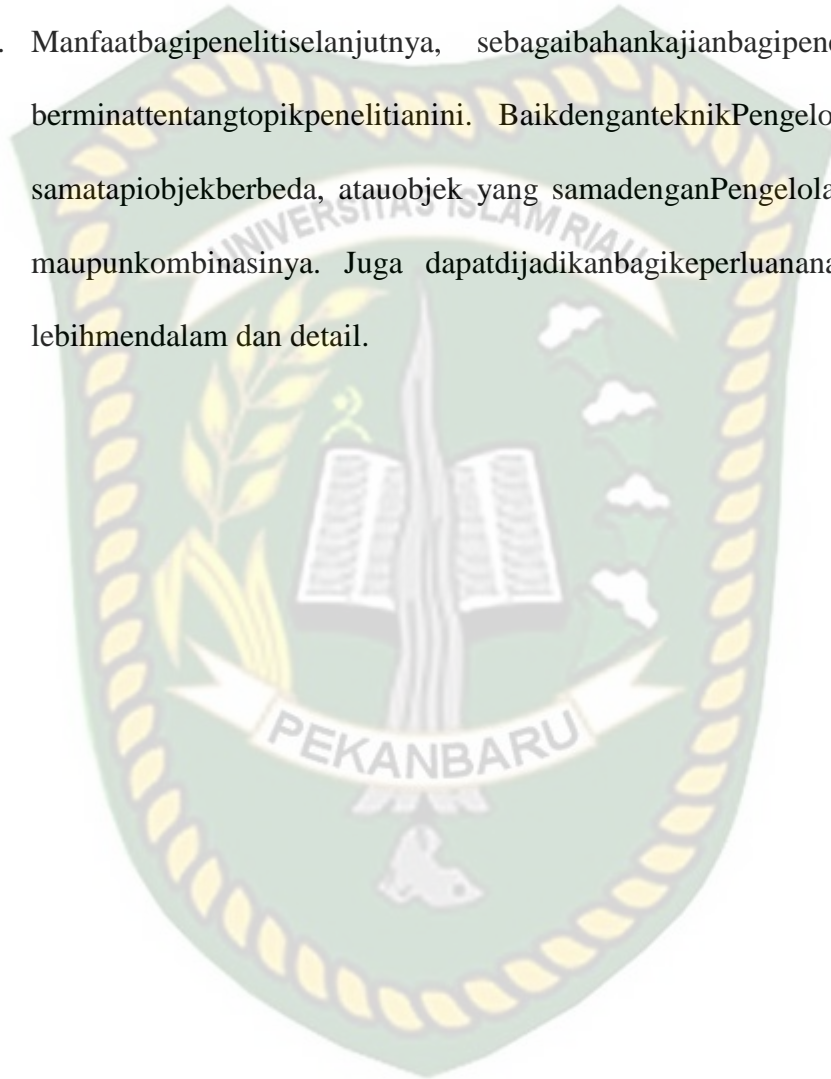
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Koordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagaiberikut:

- a. Manfaat bagi kepentingan Akademis, pengembangan ilmu dministrasi Khususnya Pelaksanaan Koordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Dalam bentuk penelitian langsung di lapangan. Disampingitu, hasil penelitian dapat semakin memperluas wawasan teoripeneliti.

- b. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi salah satu inspirasi bagi pimpinan organisasi dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kerja pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan kajian bagi peneliti yang berminat tentang topik penelitian ini. Baik dengan teknik Pengelolaan yang sama tapi objek berbeda, atau objek yang sama dengan Pengelolaan berbeda, maupun kombinasinya. Juga dapat dijadikan bagi keperluan analisis yang lebih mendalam dan detail.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimanaposisi dan pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topic masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembaca mengingatkan hasil penelitian.

1. Konsep Administrasi

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengatur, mengurus, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengatutan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya.

Administrasi sebagai objek studi ilmu administrasi, merupakan fenomena masyarakat modern. Dalam arti sempit menurut Sadikin dan Darmadi (2011;4) administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data informasi secara sistematis serta untuk memudahkan memperolehnya kembali

Menurut Herbert A. Simon (dalam Syafii, 2016;3), Administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut Waldo (dalam Zulkifli,2005;19) yaitu secara eksplisit administrasi menggambarkan salah satu fenomena suatu bentuk upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Denganini juga dikatakan oleh White (dalam Zulkifli,2005;19) pendapat ini menerangkan bahwa administrasi menupakansuatu proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia melalui berbagai lembaga untuk macam-macam kepentingan sesuai dengan yang dikehendakinya.

Administrasi menurut Sadikin dan Darmadi (2011;4) administrasi berhubungan dengan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.Artinya administrasi memiliki hubungan erat dengan kerjasama, sehingga bisa mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Kemudian dalam buku yang sama menurut Siagian (dalam Sadikin dan Darmadi,2011;5) administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Kemudian menurut Soewarno (dalam Sadikin dan Darmadi,2011;5) administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (dalam Syafie, 2012;9) administrasi didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan

sebelumnya. Artinya, tidak akan terlaksana suatu kegiatan dalam organisasi apabila tidak dibarengi dengan kerjasama yang terarah.

Senada dengan itu Atmosudirjo (dalam Syamsiar,2006;9) menjelaskan bahwa admistrasi merupakan fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada adminisrasi ini berkaitan dengan organisasi,artinya administrasi itu terdapat didalam administrasi didalam masyarakat harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masi hidup,disuatu administrasi.Administrasi pada hakikatnya adalah mengarahkan kegiatan-kegiatan kita secara terus menerus menuju tercapainya tujuan, dan mengendalikan sumber-sumber daya beserta gerak-gerik pemanfaatannya sesuai dengan peraturan-peraturan dan rencana-rencana kita.

Menurut White (dalam Syafie, 2003;4) administrasi adalah suatu proses yang umum pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Artinya administrasi memiliki tujuan yang sama, yakni kearah pencapaian tujuan,

Bila dicermati secara seksama,meskipun dirangkai dengan susunan kata yang berlainan,namun defenisi-defenisi tersebut tetap mempunyai inti yang sama,yaitu memandang administrasi sebagai kegiatan atau aktivitas pekerjaan atau perbuatan maupun usaha yang berientasi pada tujuan organisasi atau sekelompok orang tersebut.

2. Konsep Organisasi

Organisasi biasanya dihubungkan atau dianggap sebagai wadah atau tempat dimana administrasi atau kerjasama sekelompok orang dalam mencapai tujuan berlangsung. Menurut Waldo (dalam Sufian,2003;13) organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang,formal dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu sistem administrasi

Secara teoritis, menurut Richard Scoot (dalam Thoha, 2014;35) organisasi dapat dipahami dari berbagai macam sudut pandang atau perspektif yaitu sebagai kesatuan rasional dalam upaya untuk mengejar tujuan, sebagai koalisi pendukung yang kuat dimana organisasi merupakan instrumen untuk mengejar kepentingan masing-masing, sebagai suatu sistem terbuka dimana kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung input dari lingkungan, sebagai alat dominasi dan banyak lagi perspektif yang dapat dipakai untuk memaknai organisasi.

Organisasi menurut Robbins (dalam Torang, 2013;25) adalah suatu entitas sosial yang terkoordinasi secara seksama, terdiri dari dua orang atau lebih dengan batasan yang relatif teridentifikasi, yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai seperangkat sasaran bersama.

Sementara itu, Siagian (dalam Zulkifli, 2009;71) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang /sekelompok orang yang disebut bawahan.

Lebih jelas lagi organisasi menurut Persons (dalam Sjamsiar,2006;20) menyebutkan bahwa organisasi merupakan suatu unit sosial (pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Mooney dalam Bratas (2009;48) untuk merancang organisasi perlu diperhatikan 4 kaedah dasar, yaitu:

1. Koordinasi,syarat-syarat adanya koordinasi meliputi wewenang,salingmelayani,perumusan tujuan dan disiplin.
2. Prinsip skalar,proses skalar mempunyai prinsip,prospek dan pengaruh sendiri yang tercermin dari kepemimpinan,delegasi dan defenisi fungsional.
3. Prinsip fungsional,adanya fungsionalisme bermacam-macam tugas yang berbeda.
4. Prinsip staf,kejelasan perbedaan antara staf fan lini.

Riva'i (2012;169), dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan manusia lain. Usaha untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan tersebut dengan membentuk hubungan kerja sama dan selanutnya membentuk kelompok-kelompok.

Sementara ini organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan.Dalam wadah kegiatan ini setiap orang harus jelas tugas,wewenang dan tanggung jawabnya,dan tata kerjanya.Pengertian yang demikian disebut organisasi yang bersifat statis, karena hanya sekedar melihat pada strukturnya,disamping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat dinamis.Dalam pengertian ini organisasi dilihat dari sudut dinamikanya,aktifitas atau tindakan dari pada tata

hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal.

Sedangkan lebih jelas Chandler dan Plan (dalam Sudikin dan Darmadi, 2011; 196) menterjemahkan organisasi sebagai sekelompok individu yang mengusakakan tujuan tertentu dengan menggunakan satu struktur yang dirancang untuk membantu mencapai tujuannya

3. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Secara umum manajemen bisa diartikan sebagai seni dan ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola manusia dan materil untuk mencapai tujuan. Sebagai alat pelaksana dari administrasi, manajemen diperlukan agar tujuan organisasi bisa dicapai sesuai dengan direncanakan.

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda. Manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Menurut Manulang (dalam Zulkifli 2015; 4) pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian:

- a. Manajemen sebagai proses
- b. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
- c. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan seni (*art*)

- d. Koonzt dan O'donnel mengemukakan manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain (dalam Marnis, 2009:3).
- e. Siagian (2003) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain

Kemudian menurut Hasibuan(2006;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemnfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Brantas (2009;4) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja,yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu.

Menurut Manullang (2009;4) manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat,sebaliknya manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena (gejala-gejala),kejadian-kejadian,keadaan-keadaan jadi dapat memberikan penjelasan.

Sikula (dalam Hasibuan,2006;2) manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan,pengorganisasian,pengendalian dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan

untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Untuk mencapai tujuan para manajer membutuhkan enam M, dengan kata lain Sarana (tools) atau manajemen untuk mencapai tujuan adalah man, money, materials, machines, methods dan markets. Kesemuanya itu disebut sumber daya. Manullang (2009;5), untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi maka diperlukanlah fungsi-fungsi manajemen, pada hakikatnya apabila dikombinasikan pendapat para ahli menurut Manullang (2009;8) fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

1. *Forecasting*
2. *Planning*
3. *Organizing*
4. *Staffing*
5. *Directing*
6. *Leading*
7. *Coordinating*
8. *Motivating*
9. *Controlling dan*
10. *Reporting*

Fungsi-fungsi manajemen tersebutlah yang akan mengolah sumber daya organisasi secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterkaitan antara manajemen dengan administrasi diterangkan Siagian (dalam Sudikin dan Darmadi, (2011:239)), manajemen merupakan inti

administrasi, karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

5. Manajemen Sumber Daya Manusia yang dijelaskan oleh Simamora (dalam Sutrisno, 2014;5) ialah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.
6. Menurut Fathoni (2006;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia
7. Menurut Desler (dalam Sutrisno, 2014;5) manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian.

Sedangkan Umar (dalam Sutrisno, 2014;7) menjelaskan manajemen Sumber Daya Manusia menurut tugasnya dapat dikelompokkan atas tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi Manajerial: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian
- b. Fungsi Operasional: Pengadaan, Pengembangan, Kompensasi, Pengintegrasian, Pemeliharaan, dan Pemutusan hubungan kerja.

- c. Fungsi ketiga ialah kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu

Sedangkan menurut Schuler (dalam Sutrisno, 2014;8), setidaknya MSDM memiliki tiga fungsi utama yaitu :

- a. Memperbaiki tingkat produktivitas
- b. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja
- c. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal.

Sedangkan definisi yang dikemukakan Hasibuan (2012;10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah semua orang yang melakukan aktivitas dengan kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh setiap individu.

8. Konsep Koordinasi

Setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan organisasi melalui bawahan harus disatukan, diintegrasikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan, dengan kata lain tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu dan karyawan tidak akan tercapai.

Menurut Handoko (2003;195) koordinasi adalah proses terpisah (departemen-departemen atau (bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Stoner (dalam Tangkilisan,2004;72) koordinasi adalah proses penyatu paduan sasaran-sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Terry (dalam Hasibuan,2006;85) koordinasi adalah usaha yang sinkron teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat,dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Selanjutnya menurut Djamin (dalam Hasibuan,2006;86) koordinasi adalah suatu kerjasama antara badan,instansi,unit dalam pelaksanaan tugas tertentu sedemikian rupa,sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Sedangkan menurut Brech(dalam Hasibuan,2006;12) koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Selanjutnya pengertian koordinasi Westa(2005;73) bahwa koordinasi berarti pekerjaan menghubungkan,menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan sehingga semua berlangsung secara tertib dan seirama menuju kearah tujuan usaha bersama.

Sedangkan Mursanto (2003;251) mengatakan koordinasi adalah kegiatan penyatuan secara terarah dan teratur untuk menciptakan kesatuan gerak atau tindakan suatu usaha mencapai tujuan organisasi. koordinasi juga merupakan

untuk mendapatkan sinkronisasi usaha yang terpangkal pada waktu dan tata urutan pelaksanaan pekerjaan.

Koordinasi menurut Manullang(2009;72) adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktifitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Serta dengan koordinasi diharapkan akan tercipta suasana kerjasama kesatuan tindakan dan kesatuan tujuan akhir. Koordinasi itu sangat penting karena :

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan
3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan
4. Supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi
5. Supaya tugas,kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Hasibuan(2008:86).

Tetapi dapat diketahui bahwa pentingnya koordinasiialah pada komunikasi,komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secaralangsung tergantung pada prolehan, penyebaran, dan pemrosesan informasi. Untuk alasan ini koordinasi pada dasarnya merupakan tugas pemrosesan informasi (Handoko, 2003;198).

Proses manajemen akan berjalan sempurna dan efektif apabila koordinasi diimplementasikan khusus pada dinami *sorganizing* dan *actuating*. Hasibuan (2006;86) membagi kordinasi dalam dua tipe, yaitu :

1. Kordinasi Vertikal, adalah kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh terhadap kegiatan unit-unit kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawab.
2. Kordinasi Horizontal, adalah mengkoordinasikan tindakan atau kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) setingkat terbagi atas :
 - a. *Interdisciplinary*, adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan menyatukan tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antar unit yang satu dengan yang lainnya secara intern dan ekstern pada unit yang sama dengan tugasnya
 - b. *Interrelated*, adalah koordinasi antar badan (instansi), unit-unit yang fungsinya berbeda tapi instansi yang levelnya sama.

Selanjutnya, Hasibuan (2006;88) menjelaskan syarat-syarat koordinasi yang baik yaitu sebagai berikut:

- a. *Sence of cooperation* (perasaan untuk berkerjasama), ini harus dilihat dari sudut pandang bagian-bagian pekerjaan bukan orang-orang.
- b. *Rivalry*, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan tarabagian-bagian agar berbagai-bagai ini berlomba untuk mencapai kemajuan.

- c. *Team Spirit*, artinya satu samalainnya pada setiap bagain harus saling menghargai.
- d. *Esprit De Corps*, artinya bagian-bagian yang diikut serta atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan bersemangat.

Selanjutnya syarat-syarat koordinasi yang baik menurut Koontz (dalam Manulang, 2008;74) adalah sebagai berikut:

1. Adanya Perencanaan

Perencanaan adalah keputusan yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan datang. Yaitu suatu perencanaan yang di proyeksikan dalam suatu tindakan.

2. Adanya Pembagian Kerja

Pembagian kerja timbul karena seseorang melakukan segala macam pekerjaan. Oleh karena itu, pembagian kerja berarti pengukhususan yang di pertimbangkan antar lain perincian tugas, pengadaan dan penempatan pegawai, kewajiban dan tanggung jawab agar terdapat efisiensi dalam menggunakan tenaga atau antara instansi-instansi yang terkait.

3. Adanya Komunikasi

Komunikasi adalah sebagai suatu informasi atau pesan melalui saluran-saluran yang disusun dari pada orang-orang yang bertindak sebagai pusat komunikasi. Komunikasi dilakukan dengan tiga cara yaitu: adanya komunikasi tidak langsung, adanya perhatian pimpinan.

4. Adanya Pertemuan

Pertemuan melalui rapat antar kelompok-kelompok untuk membahas dan memecahkan masalah yang dihadapi.

Dari cara-cara yang telah disebutkan diatas terlihat bahwa kordinasi yang efektif akan berjalan dengan adanya informasi yang diberikan dan didapatkan serta diberikan oleh anggota oleh anggota organisasi, kemudian mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi,meningkatkan hubungan antara individu dan anggota organisasi serta melakukan komunikasi antara sesama anggota organisasi, serta melakukan komunikasi antara secara anggota organisasi, maka apabila cara-cara tersebut dilakukan maka koordinasi antara bagian dalam organisasi akan berjalan baik serta dapat mencapai tujuan organisasi.

9. Pemberdayaan Masyarakat

Winarni dalam (Teguh, 2004; 79) mengungkapkan perbedayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti perdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga menciptakan hingga mencapai kemandirian. Kemudian menurut Toko dan Poerwoko (2012:27) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai;

Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkunganya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya,

termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait pekerjaannya, dan aktivitas sosialnya.

Menurut Teguh (2004:77) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.

Pemberdayaan menurut Suparjan Hempri (2003:43), mengatakan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu *to give or authority* dan *to give to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan dalam sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Jadi prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut, dilandasi oleh nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut dan harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat tersebut dan harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat agar lebih berdaya. Dalam memberdayakan masyarakat disebutkan tahap pemberdayaan yang jelas dan terarah, disebutkan tahap-tahap pemberdayaan menurut Suparjan(2003:44) dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kendaran kritis atau posis masyarakat dalam struktur sosial politik. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri.
- b. Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat agumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat pemutusan terhadap hal tersebut
- c. Peningkatan kepastian masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan sosial budaya dan keamanan.
- d. Pemberdayaan juga perlu meningkatkan dengan pembangunan sosial budaya masyarakat

Sedangkan menurut Teguh (2004: 83) bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan di atas bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlansung secara bertahap.

Menurut Teguh (2004:83), tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga marasa membutuhkan peningkatan kapastian diri

- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian.

Dengan diadakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka akan dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri, yang sudah bisa mengerti akan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan bisa mewujudkan pembangunan di daerah. Jadi kesimpulannya, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberian daya atau kekuatan (power) terhadap perilaku dan potensi individu atau masyarakat, serta pengorganisasian kelompok masyarakat oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas dasar partisipasi. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memiliki inisiatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan disekitarnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik.

B. Kerangka Pikir

Dari latar belakang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta didukung oleh fenomena sehingga dapat diadakannya penelitian kemudian melihat dasar-dasar teoritis yang dapat digunakan, maka dibuatlah kerangka pikir sebagai alur berpikir penulis dan rangkaian proses penelitian yang akan dilakukan, maka kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar II.1: Kerangka Pikir Penelitian Analisis Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.



Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2019.

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan fenomena serta konsep teoritis yang telah dikemukakan, maka dapatlah dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut: Diduga bahwa Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Belum Terlaksana dengan baik..

D. Konsep Operasional

Untuk memperjelas konsep teoritis dan pengertian yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikator yakni sebagai berikut :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
2. Organisasi adalah tempat dimana seluruh kerjasama untuk pencapaian tujuan yang dilaksanakan dengan menggunakan pembagian kerja anggota sebagai aktivitas utamanya
3. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan

4. Koordinasi adalah suatu usaha penyelarasan dari bagian atau unit-unit yang satu dengan lainnya dalam berbagai kegiatan sebagai usaha mencapai tujuan organisasi
5. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat ialah memberikan sesuatu informasi yang dapat menambah pengetahuannya dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi
6. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota adalah kegiatan yang dilakukan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan
7. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide dan saran-saran ialah memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk dapat memberikan masukan seperti saran dan ide untuk membangun kegiatan agar lebih baik lagi.
8. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran merupakan peran serta seseorang atau kelompok dalam proses kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian.
9. Membina human *relations* yang baik antara sesama karyawan ialah usaha untuk memupuk hubungan yang baik dalam kerjasama untuk melaksanakan suatu kegiatan dan selaras guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Sering melakukan komunikasi informasi yaitu penyampaian dan pertukaran Informasi sekurang-kurangnya dua pihak dengan menggunakan berbagai media.

E. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel merupakan konsep yang penulis tetapkan sebagai batasan penelitian dan juga penilaian variable dalam penelitian ini yang berdasarkan teori yang telah penulis paparkan pada studi keputusan, operasionalisasi variabel dalam penelitian ini di sajikan dalam bentuk table, yang mana berisi mengenai uraian konsep variable indikator, ukuran dan skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka operasionalisasi variabel dapat dilihat pada table dibawah ini:



Tabel III.1: Operasional Variabel Analisis Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Pengukuran
Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan menggerakkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Terry (dalam Hasibuan 2006: 85)	Koordinasi	1. Perencanaan	a. Merencanakan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan b. Menentukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	- Baik - Cukup Baik - Kurang Baik
		2. Pembagian Kerja	a. Pembagian tugas pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan umum b. Pembagian Kerja dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi	- Baik - Cukup Baik - Kurang Baik
		3. Komunikasi	a. Sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat b. Terjalannya koordinasi antara instansi terkait mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	- Baik - Cukup Baik - Kurang Baik

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Pengukuran
		4. Pertemuan	a. Rapat mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat. b. Strategi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dihasilkan dari pertemuan	- Baik - Cukup Baik - Kurang Baik

Sumber: Modifikasi penulis 2019

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu : Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik.

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

1. Ukuran Variabel

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir 67%-100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan
Hilir 34%-66%

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir 1%-33%

2. Ukuran Indikator Variabel

a. *Perencanaan* yaitu menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator perencanaan berada pada skala 67%-100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator perencanaan berada pada skala 34%-66%

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator perencanaan berada pada skala 1%-33%

b. *Pembagian Kerja* merupakan suatu aktivitas dalam menentukan apa pekerjaan yang dilakukan dan siapa yang melakukan tugas tersebut.

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator pembagian kerja berada pada skala 67%-100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator pembagian kerja berada pada skala 34%-66%

KurangBaik : Apabila penilaian terhadap indikator pembagian kerjaberada pada skala 1%-33%

c. *Komunikasi* yaitu suatu proses interaksi manusia dengan berbagai bentuk/cara untuk menyampaikan informasi atau untuk tujuan tertentu.

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator komunikasi berada pada skala 67%-100%

CukupBaik : Apabila penilaian terhadap indikator komunikasi berada pada skala 34%-66%

KurangBaik : Apabila penilaian terhadap indikator komunikasi berada pada skala 1%-33%

d. *Pertemuannya* yaitu suatu pertemuan antara anggota organisasi yang bertujuan untuk merundingkan/memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan organisasi.

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator pertemuan berada pada skala 67%-100%

CukupBaik : Apabila penilaian terhadap indikator pertemuan berada pada skala 34%-66%

KurangBaik : Apabila penilaian terhadap indikator pertemuan berada pada skala 1%-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, dengan Analisa kuantitatif. Yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian yaitu kuisioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan lainnya (dalam Sugiyono, 2003;11).

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistic objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survey untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapa mereka.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Dimana dalam menjalankan tugasnya sebagai camat yaitu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terlihat masih banyak permasalahan yang terjadi sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat terindikasi masih belum maksimal.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2012;80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Seluruh pegawai pada Kantor Camat Bagan Sinembah dan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili).

Maka sampel pada penelitian ini merupakan sebagian dari pegawai kantor Camat Bagan Sinembah dan sebagian dari masyarakat Bagan Sinembah, untuk lebih jelasnya mengenai sampel penelitian dapat dilihat dari table dibawah ini.

Tabel III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian.

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Camat	1	1	100 %
2	Kasi Kesejahteraan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	100 %
4	Ketua LPM Se Kecamatan	17	17	100%
5	Kepala Desa Se Kecamatan	17	17	100%
6	Masyarakat Yang Ikut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	40	40	100%
Jumlah		76	76	100%

Sumber : Modifikasi Penulis 2019.

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel penelitian ini menggunakan teknik sensus yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan anggota populasi secara keseluruhan, untuk camat, kasi pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat yang ikut kegiatan pemberdayaan masyarakat, kepala desa dan LPM menggunakan teknik sensus.

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang baik serta keterangan-keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan peneliti turun langsung kelapangan/lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap serta berkaitan dengan masalah yang

diteliti, yaitu langsung mewawancarai informan yang menjadi objek penelitian. Sehingga diperoleh data, informasi serta keterangan mengenai penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan yang relevan dari organisasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dari Kantor Camat Bagan Sinembah, baik dari dokumen resmi yang diberikan seperti arsip literature berupa struktur organisasi, maupun informasi atau keterangan yang telah dipublikasikan/ditempelkan di papan/dinding informasi di Kantor Camat Bagan Sinembah

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

2. Kuisisioner/Angket

Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebar daftar pertanyaan untuk diisi oleh sejumlah responden (Narimawati, 2007:64).

Pengumpulan data untuk penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan angket atau kuisisioner.

3. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi

yang didapatkan oleh peneliti lebih absah, jelas dan akurat serta aktual. Dan kemudian teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau responden yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video maupun rekaman atau media lain.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diamati dan diselidiki agar jelas keadaan kondisi sebenarnya. Penemuan fenomena dan gejala-gejala itu tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk juga usaha menemukan hubungan satu dengan lainnya didalam aspek yang diteliti.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera antara 101o4' -2030' LU dan 100o16' -101o21' BT. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km², dengan jumlah Kecamatan pada tahun 2015 adalah 18 Kecamatan, dimana Kecamatan Tanah Putih merupakan Kecamatan Terluas yaitu 1.915,23 Km² dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 Km². Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
- b. Sebelah selatan : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
- c. Sebelah timur : Kota Dumai
- d. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Utara

Sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa terutama di sepanjang sungai rokan hingga ke muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Provinsi Riau. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir juga terdiri dari daratan yang menyatu dengan pulau Sumatera dan beberapa pulau-pulau disekitarnya.

Kabupaten Rokan Hilir di pengaruhi oleh keberadaan 16 aliran sungai. Sungai Rokan merupakan sungai utama dengan panjang 350 km dan kedalaman 6-18 m yang melintasi kecamatan Bangko, Rimba Melintang dan Tanah Putih. Sungai Rokan berasal dari dua cabang anak sungai yaitu sungai Rokan Kanan dan sungai Rokan Kiri yang hulu anak sungainya di pegunungan bukit barisann pada bagian timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada bagian barat kabupaten rokan hulu.

Secara Administratif Kabupaten Rokan Hilir telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah sejak terbentuknya pada tahun 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten induknya Bengkalis sesuai dengan Undang-undang No. 53. Pada awal berdirinya Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 6 Kecamatan yaitu kecamatan Bangko, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Kubu. Seiring dengan bertambahnya waktu dan pertumbuhan penduduk maka dilakukan beberapa kali pemekaran. Setelah lebih kurang 14 (empat belas) tahun Kabupaten Rokan Hilir berdiri, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menjadi 15 kecamatan.

B. Gambaran Umum Kecamatan Bagan Sinembah

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Bagan Sinembah terdiri dari 34 Desa/kelurahan, adapun batas-batas wilayah kecamatan Bagan Sinembah adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Simpanng Kanan

2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Pujud
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako.

Jarak Ibu Kota Kecamatan dengan ibu kota Kabupaten adalah 68.00 Km, sedangkan jarak pusat wilayah Kecamatan dengan Desa/Kelurahan yang terjauh sekitar 20 km. Dilihat dari lokasi wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Bagan Sinembah berfoto-grafi dataran rendah/hamparan dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah padosolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dangley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Dengan foto-grafi dataran rendah/hamparan Kecamatan Bagan Sinembah merupakan daerah lintas Sumatera yang ramai dilalui kendaraan, selain itu daerah ini juga banyak terdapat perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh swasta.

Jumlah penduduk Kecamatan Bagan Sinembah berdasarkan laporan Penduduk pada Tahun 2013 dari sekecamatan Bagan Sinembah adalah berjumlah 128.339 jiwa dengan jumlah laki-laki 66.680 dan perempuan 63.635, sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 31.240.

Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk setiap tabel dapat dilihat bahwa penyebaran penduduk di kec. Bagan Sinembah secara garis besar dibagi dua, padat dan kurang padat. Yang padat penduduknya berada di dua desa yaitu Balam Sempurna dan Bagan Batu Kota. Sedangkan pada desa-desa lainnya penduduknya kurang padat karena dihuni oleh penduduk asli yang berprofesi sebagai petani.

Penghasilan masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah terbanyak yaitu Sektor Perkebunan Kelapa Sawit merupakan komoditas paling banyak produksinya, total luas tanaman kelapa sawit mencapai 79,517 Ha yang menghasilkan 258,656,3 ton CPO.

C. Gambaran Umum Kantor Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Kantor Kecamatan Bagan Sinembah dipimpin oleh Camat yaitu Sakinah, S.STP.,M.Si. Kantor kecamatan Bagan Sinembah terletak di Jalan Jend. Sudirman Km No. 8, Gelora, Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Melalui Kantor Kecamatan Bagan Sinembah ini, warga dapat mengurus berbagai bentuk perizinan. Beberapa perizinan yang sering dibuat terkait dengan penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK), rekomendasi surat pengantar SKCK, surat keterangan domisili, surat izin menutup jalan untuk pembangunan atau acara, pengesahan surat keterangan miskin, dipensasi nikah, rekomendasi dan pengesahan permohonan cerai, belum menikah, dan menikah. Surat-surat lainnya yang dapat diurus terkait perizinan tertentu seperti surat eksplorasi air tanah, pennggalian mata air, surat perubahan penggunaan tanah, waris, hingga wakaf. Ada banyak fungsi dan tugas Kantor Kecamatan Bagan Sinembah.

Visi Kantor Kecamatan Bagan Sinembah

1. Terwujudnya tingkat pendapatan bagi masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah
2. Tingginya tingkat pendidikan
3. Terwujudnya infrastruktur yang memadai
4. Terwujudnya tingkat kesehatan masyarakat
5. Tingginya Angka Harapan Hidup dan Kualitas Pelayanan Sosial yang Baik
6. Terwujudnya tingkat kemakmuran masyarakat di kecamatan Bagan Sinembah

Misi Kantor Kecamatan Bagan Sinembah

Gunamewujudkan Visitersebut, ditetapkan misisebagaiberikut:

1. Mewujudkan pemerintah handal, bersih dan berwibawa
2. Mewujudkan masyarakat yang berbudaay melayu yang berlandaskan iman dan taqwa
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat
5. Mewujudkan infrastruktur dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat baik sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan lain-lain.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 76 Orang Responden yang terdiri dari 1 Camat Bagan Sinembah, 1 orang KASI Kesejahteraan Pemberdayaan Masyarakat, 17 orang Ketua LPM Sekecamatan Bagan Sinembah, 17 orang Kepala Desa sekecamatan Bagan Sinembah dan 40 orang peserta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin untuk menilai Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1 : Identitas Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	32	94%
2.	Perempuan	2	6%
Jumlah		34	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 32 orang atau 94.7% responden,

sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang atau 6 % responden,
untuk menilai Pelaksanaan Koordinasi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Jadi, kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa perangkat kecamatan, LPM sekecamatan dan Kepala desa di kecamatan bagan sinembah pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir mayoritasnya adalah berjenis kelamin laki-laki.

Adapun alasan kenapa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yaitu karena pegawai dalam kantor camat, ketua LPM dan Kepala Desa mayoritasnya laki-laki. Sehingga responden Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM sekecamatan dan Kepala Desa bermayoritas laki-laki.

TabelV.2 : IdentitasResponden Masyarakat Yang MengikutiKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	JenisKelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	21	52%
2.	Perempuan	19	48%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Hasil PenelitianTahun 2019

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah adalah sebanyak 21 orang responden laki-laki dengan persentase 52% dan sebanyak 19 orang responden perempuan dengan persentase mencapai 48% dari jumlah total keseluruhan responden masyarakat.

Adapun alasan kenapa responden masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih dominannya laki-laki karena laki-laki merupakan kepala keluarga yang mempunyai tanggungjawab memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya dengan cara mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Umur Responden

Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur disini penulis mengelompokkan umur responden dengan cara tingkatan. Dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur responden penelitian, dari itu tabel mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.3 : Identitas Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM sekecamatan dan Kepala Desa pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Umur.

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	17-30	10	29,4%
2.	31-40	13	38,2%
3.	41-50	9	26,6%
4.	51 Tahun Keatas	2	5,8%
Jumlah		34	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden yang mendominasi tingkat umur responden berada pada tingkat umur 17-30 Tahun berjumlah 10 orang responden dengan persentase 29,4%, dan diikuti umur responden pada 31-40 Tahun yang berjumlah 13 orang responden dengan

persentase sebesar 38,2%, kemudian umur responden pada 41-50 Tahun 9 orang responden dengan persentase 26,6%, dan umur responden 51 Tahun Keatas berjumlah 2 orang dengan persentase sebesar 5.8%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang diminta pendapatnya lebih dominan berada pada umur 31-40 Tahun.

Adapun alasan kenapa umur responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM sekecamatan dan Kepala Desa yang lebih mendominasi yaitu umur 31-40 dibanding umur lainnya karena umur tersebut masih termasuk dalam umur produktif kerja. Dan pada umur tersebut biasanya sudah lebih banyak pengalaman dalam bekerja dibandingkan umur-umur dibawahnya. Yang mana pengalaman kerja tersebut sangat bermanfaat bagi penulis dalam menggali informasi.

Tabel V.4 : Identitas Responden Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah berdasar kan Umur.

No	Umur	Jumlah	Responden
1.	17-30	11	27,5%
2.	31-40	14	35%
3.	41-50	10	25%
4.	51 Tahun Keatas	5	12,5%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden yang mendominasi berada pada tingkat umur 17-30 Tahun berjumlah 11 orang responden dengan persentase 27.5%, dan diikuti umur responden pada 31-40 Tahun yang berjumlah 14 orang responden dengan persentase sebesar 35%, kemudian umur 41-50 berjumlah 10 orang dengan persentase 25% dan umur

responden pada 51 Tahun Keatas berjumlah 5 orang dengan persentase sebesar 12,5%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang diminta pendapatnya lebih didominasi berada pada umur 31-40 Tahun.

Adapun alasan lebih dominannya responden masyarakat yang berumur 31-40, karena di umur tersebut masih banyak masyarakat yang masih bisa mengikuti perkembangan zaman dan mau berkembang karena faktor banyaknya tanggungan dibandingkan umur 51 tahun keatas. Biasanya masyarakat yang berumur 51 tahun keatas lebih memilih mengerjakan pekerjaan yang sudah ada dan tidak ingin ribet.

3. Pendidikan Responden

Kemudian dalam identitas responden yang berada pada penelitian ini terdapat juga identitas Tingkat Pendidikan terakhir, maka Tabel mengenai informasi pengelompokan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.5 : Identitas Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM sekecamatan dan Kepala Desa pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	-	-
2.	SMP	4	11.7%
3.	SMA	19	55.8%
4.	Strata Satu (S1)	9	26,4%
5.	Strata Dua (S2)	2	5.8%
Jumlah		34	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa tingkat

pendidikan responden Perangkat Kecamatan, LPM sekecamatan dan Kepala Desa pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, yakni sebanyak 4 orang atau 11.7% lulusan SMP, 19 orang responden lulusan SMA yaitu 55.8%, 9 orang responden lulusan S1 yaitu 26,4% dan 2 orang responden lulusan S2 dengan persentase 5.8%. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat pendidikan terakhir Perangkat Kecamatan, LPM sekecamatan dan Perangkat Desa pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir didominasi oleh lulusan SMA.

Dikecamatan Bagan Sinembah Aparatur Kecamatan ataupun Desa masih banyak berpendidikan SMA. Sehingga responden dalam penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikannya SMA lebih mendominasi. Padahal jika aparat yang Kecamatan dan Desa itu minimal berpendidikan S1 mungkin Kecamatan Bagan Sinembah akan lebih baik lagi baik dalam pemerintahannya maupun pelayanannya. Selain itu kita tahu bahwa desa setiap tahunnya mendapatkan anggaran desa yang sangat besar sehinggalah sangat disayangkan jika tidak dikelola oleh orang yang tepat dan mempunyai ilmu.

TabelV.6 : Identitas Responden Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Berdasarkan Umur berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	12	30%
2.	SMP	19	47,5%
3.	SMA	9	22,5%
4.	Strata Satu (S1)	-	-
5.	Strata Dua (S2)	-	-
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan hilir, yakni sebanyak 12 orang atau 30% lulusan SD, 19 orang atau 47,5% responden lulusan SMP, dan 9 orang responden atau 22,5% lulusan SMA. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat pendidikan terakhir masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan hilir didominasi oleh lulusan SMP.

Lebih dominannya responden masyarakat yang berpendidikan SMP karena yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat memang mayoritasnya berpendidikan SMP. Kenapa begitu? Karena mereka sulit mendapatkan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Sehingga mereka memilih ikut dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat menambah ilmu

mereka dan membuka peluang kerja dan penghasilan mereka tanpa tidak perlu khawatir lagi untuk mendapatkan pekerjaan diluar sana.

B. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

- C. Pelaksanaan Koordinasi dalam sebuah kegiatan atau program yang telah dibuat sangatlah penting, karena percuma adanya sebuah kegiatan atau program tanpa adanya koordinasi antara pelaksana kegiatan atau program tersebut.
- D. Maksud pedoman penilain pelaksanaan koordinasi ini digunakan sebagai acuan lembaga dan pemerintah daerah dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah agar penilaian pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Sehingga dapat terwujudnya koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara efektif, sehingga penilaian dapat menghasilkan pemeringkatan unit pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai dasar pemberian penghargaan sehingga mendorong unit pelaksana kegiatan mampu melaksanakan kegiatan atau program secara maksimal kepada masyarakat.
- E. Dalam rangka untuk mendapatkan keberhasilan pelaksanaan koordinasi hendaknya menggunakan beberapa tolak ukur yang menjadi acuan berlangsungnya Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hillir,

diantaranya yaitu : Perencanaan, Pembagian Kerja, Komunikasi, Pertemuan.

1. Perencanaan

Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dapat diukur salah satunya dengan indikator Perencanaan. Perencanaan sebagai keputusan yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan datang. Yaitu suatu perencanaan yang di proyeksikan dalam suatu tindakan. Perencanaan atau yang sudah akrab dengan istilah *planning* adalah satu dari fungsi management yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan ini selalu melekat pada kegiatan hidup kita sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Sebuah rencana akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Karena itu pekerjaan yang baik adalah yang direncanakan dan sebaiknya kita melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kaufman (1972) sebagaimana dikutip Harjanto, Perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai. Bintoro Tjokroaminoto mendefinisikan perencanaan sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM sekecamatan dan Kepala Desa pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berjumlah 34 orang responden dan 40 orang responden masyarakat terhadap indikator Perencanaan yang terdiri dari empat item penilaian yaitu perencanaan

kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah sesuai kebutuhan, perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah baik, sarana dan prasarana dalam perencanaan, sarana dan prasarana dapat digunakan oleh semua peserta kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel V.7 : Tabel Skor Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Perencanaan pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

No	Perencanaan	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	8	17	9	34
2.	Sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan oleh semua peserta kegiatan	9	22	3	34

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Maksud dan tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya (tujuan umum). Maka berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa perencanaan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar sehingga tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tercapai. Kemudian dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat direncanakan dengan baik sehingga tidak ada lagi perencanaan (planning) yang hanya membuang/menghabiskan anggaran tetapi tidak bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya didalam perencanaan diperlukan adanya perencanaan tentang sarana

dan prasarana yang mendukung setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana dan prasarana (material) yang sudah disediakan dapat di manfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat itu dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berikutnya hasil jawaban item penilaian dari responden PerangkatKecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan KepalaDesa, daritabel V.7 dapat dilihat bahwadari 34 orang responden, Item penilaian pertamamengenai Perencanaan kegiatanpemberdayaanmasyarakat ditanggapi Baiksebanyak 8 orang responden, Ditanggapi CukupBaik 17 orang responden Dan ditanggapi Kurang Baiksebanyak 9 orang responden.

Item penilaian tentang Sarana dan prasaran adapat digunakan oleh semua peserta kegiatan, item penilaian ini juga di tanggapi Baik sebanyak 9 orang responden, ditanggapi cukupbaik 24 orang responden dan ditanggapi kurang baik sebanyak 3 orang respponden.

Tabel V.7 : Analisis Jawaban Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Perencanaan pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

No	Perencanaan	Kategori Penilaian			Total
		Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
1.	Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	24	34	9	67
2.	Sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan oleh semua peserta kegiatan	27	44	3	74
Total Skor		51	78	12	141

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel di atas dan teknik perhitungan penelitian yang digunakan yaitu :

$$\text{Skor tertinggi} : 34 \times 3 = 102$$

$$\text{Skor Indikator} : 102 \times 2 = 204$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Indikator}} \times 100 = \frac{102}{204} \times 100 = 50\%$$

Berdasarkan hasil analisis distribusi jawaban responden mengenai perencanaan pada pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan hilir sebanyak 50% sehingga dapat dikategorikan baik, apabila berada antara 34-66%

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Ibu Sakinah, S.STP M.Si mengenai Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Beliau menjawab:

“Jadi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah kita lakukan sejak awal tahun. Dimana dalam perencanaan dihadiri oleh semua kepala desa, UPTK, UPTD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.. Pada saat pembuatan perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan laporan setiap Kepala Desa” (Wawancara, Jam, Hari/Tanggal: 11.00 Wib, Kamis, 1 Agustus 2019).

Berdasarkan jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tanggapan dari Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa mengenai indikator Perencanaan “Baik”.

Sedangkan tanggapan responden masyarakat yang ikut kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berjumlah 40 orang responden memiliki pendapat yang berbeda mengenai indikator perencanaan Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.8 : Tabel Skor Responden Masyarakat Mengenai Indikator Perencanaan Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

No	Perencanaan	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	5	25	10	40
2.	Sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan oleh semua peserta kegiatan	8	22	10	40

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari item penilaian di atas dapat dijelaskan Maksud dan tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya (tujuan umum). Maka berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa perencanaan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar sehingga tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tercapai. Kemudian dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat direncanakan dengan baik sehingga tidak ada lagi perencanaan (planning) yang hanya membuang/menghabiskan anggaran tetapi tidak bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya didalam perencanaan diperlukan adanya perencanaan tentang sarana dan prasarana yang mendukung setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana dan prasarana (material) yang sudah disediakan dapat di manfaat kan sebaik mungkin oleh masyarakat, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat itu dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berikutnya hasil jawaban item penilaian dari responden Masyarakat, Dari tabel V.8 dapat kita lihat bahwa pada item penilaian pertama dari 40 orang responden masyarakat 5 orang, Selanjutnya 8 orang responden masyarakat menanggapi Cukup Baik. Dan 10 orang menanggapi Kurang Baik terhadap Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Item penilaian kedua mengenai Sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan oleh semua peserta kegiatannya itu dari 40 responden Masyarakat, 8 responden masyarakat menanggapi Baik. Selanjutnya 22 orang respon den masyarakat

menanggapi Cukup Baik. Kemudian responden masyarakat yang menanggapi Kurang Baik sebanyak 10 orang responden.

Tabel V.8 : Analisis Jawaban Responden Masyarakat Mengenai Indikator Perencanaan Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

No	Komunikasi	Kategori Penilaian			Total
		Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
1.	Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	15	16	10	41
2.	Sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan oleh semua peserta kegiatan	24	44	10	74
Total Skor		39	60	20	119

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dan teknik perhitungan penelitian yang digunakan yaitu :

$$\text{Skor tertinggi} : 40 \times 3 = 120$$

$$\text{Skor Indikator} : 120 \times 2 = 240$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Indikator}} \times 100 = \frac{119}{240} \times 100 = 49.6\%$$

Berdasarkan hasil analisis isi jawaban responden Masyarakat Mengenai Indikator Perencanaan pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 49.6% sehingga dapat dikategorikan cukup baik, karena berada diantara 34-66%.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan pada indikator Perencanaan, masih banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kecamatan Bagan Sinembah yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di Bidang Pembangunan. Yaitu pembuatan Gapura di desa-desa. Padahal banyak kegiatan pemberdayaann masyarakat yang lebih penting untuk menunjang ekonomi masyarakat. Dan berdasar kan tangga panresponden Masyarakat terhadap indikator Perencanaan yang dilakukan kantor Camat Bagan Sinembah yaitu CukupBaik.

Kemudian dari hasil wawancara denganrespon denmasyarakat, mengenai Indikator Perencanaan dengan pertanyaan yaitu Apakah dalam pembuatan perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan aspirasi dan apakahsarana dan prasarana dalam perencanaan dapat dinikmati oleh semua masyarakat? Masyarakat menjawab:

“Dalam masalah aspirasi warga, camat di sini selalu memberikan kesempatan sebaik mungkin kepada kami untuk mengeluarkan aspirasi. Beliau tdak pernah segan untuk mendengarkan keluhan warga apalagi kalau ada rapat di aula kantor kelurahan, begitu pun kalau hanya mendengarkan dalam pergaulan camat Bagan Sinembah selalu terbuka kepada kami. Meskipun tidak ada pertemuan langsung keluhan warga juga bisa dibawaikan oleh lurah, ketua RW atau tokoh masyarakat lainnya” (Wawancara , Jam, Hari/Tanggal: 13.00 Wib, Kamis 1 Agustuus 2019).

Dari wawancara dengan responden masyarakat diatas, dapat dijelaskan bahwa indikator Perencanaan yang terdiri dari 4 item penilaian yaitu perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah sesuai kebutuhan, perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah baik, sarana dan prasarana dalam

perencanaan, sarana dan prasarana dapat digunakan oleh semua peserta kegiatan. Perencanaan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Perencanaan yang matang akan dapat direalisasikan dengan efektif dan efisien.

2. **Pembagian Kerja**

Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dapat diukur salah satunya dengan indikator Pembagian Kerja. Pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa yang berjumlah 34 orang responden dan 40 orang responden masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap indikator Pembagian Kerja yang terdiri dari empat item penilaian yaitu Pembagian Kerja dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Pelayanan Umum, Pembagian Kerja dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pelayanan Umum yang tidak berkompeten, Pelaksanan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi yang tidak berkompeten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TabelV.9 : Tabel Skor Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Pembagian Kerja pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten RokanHilir.

No	Pembagian Kerja	KategoriPenilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	PembagianKerjadalamkegiatanpemberdayaanmasyarakat pada BidangPelayananUmm	5	22	7	34
2.	PembagianKerjadalamKegiatanPemberdayaan Masyarakat di BidangEkonomi	4	21	9	34

Sumber: Data Olahandari tablehasilPenelitianTahun 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pembagian kerja adalah analisis jabatan yang merupakan suatu aktivitas dalam menentukan apa pekerjaan yang dilakukan dan siapa yang harus melakukan tugas tersebut. Aktivitas ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan kualitas dari pekerjaan dan kualitas dari kinerja total suatu perusahaan. Perusahaan akan baik jika sumberdaya manusia didalamnya telah mampu melaksanakan pekerjaan masing – masing dengan jelas, spesifik, serta tidak memiliki perantara yang dapat menghambat proses pencapaian kinerja. Analisis jabatan perlu dilakukan agar dapat mendesain organisasi serta menetapkan pembagian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan.

Pembagian kerja dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pelayanan Umum merupakan program pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam bidang Administrasi. Bentuk

program dari pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan umum yaitu: Pelayanan KTP, Pembuatan Kartu KK, Akte Kelahiran, Surat Pindah, Surat Kematian, Rekomendasi Pernikahan, Rekomendasi Surat Izin Usaha, Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan, Rekomendasi Hiburan Masyarakat dan surat menyurat lainnya.

Pembagian kerja dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDES, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini yaitu berupa: Pelatihan, workshop (Pelatihan keterampilan bekerja atau berusaha bagi kaum wanita yang dilaksanakan melalui organisasi PKK), Pemodalán/permodalan, Bantuan alat produksi, Peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain, Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi).

Adanya pegawai atau pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak berkompétén merupakan suatu penghalang atau merupakan penyebab terjadinya ketidak keberhasilan Kecamatan Bagan Sinembah dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Berikutnya hasil jawaban item penilaian dari responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa, Dari tabel V. 9 dapat dilihat bahwa dari 34 orang responden, untuk item Pembagian Kerja dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pada Bidang Pelayanan Umum yang men

jawab baik 5 orang responden, yang menjawab cukup baik 24 orang dan yang menjawab kurang baik 7 orang responden.

Item penilaian yang kedua mengenai Pembagian Kerja dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi ditanggapi Baik berjumlah 4 orang, yang menjawab cukup baik 22 orang responden dan yang menjawab kurang baik 9 orang responden.

Tabel V.9 : Analisis Jawaban Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Pembagian Kerja pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

No	Pembagian Kerja	Tolak Ukur			Total
		Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
1.	Pembagian Kerja dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pada Bidang Pelayanan Umum	15	44	7	70
2.	Pembagian Kerja dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi	12	42	9	67
Total Skor		27	86	16	129

Sumber: Data lahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dan teknik perhitungan penelitian yang digunakan yaitu :

$$\text{Skor tertinggi} : 34 \times 3 = 102$$

$$\text{Skor Indikator} : 129 \times 2 = 258$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Indikator}} \times 100 = \frac{129}{258} \times 100 = 50\%$$

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Pembagian Kerja pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 50% sehingga dapat dikatakan cukup baik dengan berada diantara 34-66%

Sementara itu hasil dari wawancara dengan Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Ibu Sakinah, S.STP M.Si mengenai Pembagian Kerja pada Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Beliau menjawab:

“Pada Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di pertemuan penyusunan perencanaan saya sudah membagikan tugas masing-masing mulai dari KASI Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh agama. Didalam menjalankan tugas kami bekerja sama agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.”(Wawancara, Jam, Hari/Tanggal: 11.00 Wib, Kamis, 1 Agustus 2019).

Lalu berdasarkan wawancara peneliti dengan KASI Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat, yaitu ibu Wirdayanti, S.Sos tentang Pembagian Kerja pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pelayanan Umum dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, beliau menjawab:

“pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan umum sudah diberikan tugas masing-masing. Di bidang pelayanan umum itu ada 5 orang anggota. Setiap ada permasalahan yang mereka hadapi dalam memberikan pelayanan mereka selalu berkomunikasi dan saya menyampaikan itu semua kepada camat untuk mencari solusi. Dan dalam memberikan pelayanan umum di kantor Camat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat kami tidak pernah memungut biaya sepersen pun. Agar partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan meningkat. Tetapi pada kenyataannya masyarakat masih enggan untuk mengurus segala urusan administrasi di bidang pelayanan umum dengan alasan ribet.”(Wawancara, Jam, Hari/Tanggal: 14.00 Wib, Jumat, 2 Agustus 2019)

Berdasarkan jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, menurut tanggapan dari responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa mengenai indikator Pembagian Kerja yaitu “Cukup Baik”

Tabel V.10 : Tabel Skor Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pembagian Kerja Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

No	Pembagian Kerja	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pembagian Kerja dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pada Bidang Pelayanan Umum	4	24	12	40
2.	Pembagian Kerja dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi	5	25	10	40

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan Pembagian kerja adalah analisis jabatan yang merupakan suatu aktivitas dalam menentukan apa pekerjaan yang dilakukan dan siapa yang harus melakukan tugas tersebut. Aktivitas ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan kualitas dari pekerjaan dan kualitas dari kinerja total suatu perusahaan. Perusahaan akan baik jika sumber daya manusia didalamnya telah mampu melaksanakan pekerjaan masing – masing dengan jelas, spesifik, serta tidak memiliki peran ganda yang dapat menghambat proses pencapaian kinerja. analisis jabatan perlu dilakukan agar dapat mendesain organisasi serta menetapkan pembagian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan.

Pembagian kerja dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pelayanan Umum merupakan program pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam bidang Administrasi. Bentuk program dari pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan umum yaitu: Pelayanan KTP, Pembuatan Kartu KK, Akte Kelahiran, Surat Pindah, Surat Kematian, Rekomendasi Pernikahan, Rekomendasi Surat Izin Usaha, Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan, Rekomendasi Hiburan Masyarakat dan surat menyurat lainnya.

Pembagian kerja dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDES, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini yaitu berupa: Pelatihan, workshop (Pelatihan keterampilan bekerja atau berusaha bagi kaum wanita yang dilaksanakan melalui organisasi PKK), Pemodalan/permodalan, Bantuan alat produksi, Peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain, Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi).

Berikutnya hasil jawaban item penilaian dari responden Masyarakat, Dari tabel V.10a dapat kita lihat bahwa pada item penilaian pertama dari 40 orang responden masyarakat 4 orang menanggapi Baik terhadap Pembagian Kerja dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pada Bidang Pelayanan Umum. Selanjutnya 24 responden masyarakat menanggapi Cukup Baik. Dan 12 orang menanggapi

Kurang Baik terhadap Pembagian Kerja dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pada Bidang Pelayanan Umum.

Item penilaian kedua mengenai Pembagian Kerja dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, 5 responden masyarakat menanggapi Baik. Selanjutnya 25 orang responden masyarakat menanggapi Cukup Baik. Kemudian responden masyarakat yang menanggapi Kurang Baik sebanyak 0 orang responden..

Tabel V.10 : Analisis Jawaban Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pembagian Kerja Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

No	Pembagian Kerja	TolakUkur			Total
		Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
1.	PembagianKerjadalamkegiatanpemberdayaanmasyarakat pada BidangPelayananUmum	12	48	12	72
2.	PembagianKerjadalamKegiatanPemberdayaan Masyarakat di BidangEkonomi	15	50	10	75
Total Skor		27	98	22	147

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dan teknikperhitunganpenelitian yang digunakanyaitu :

$$\text{Skortertinggi} : 40 \times 3 = 120$$

$$\text{SkorIndikator} : 120 \times 2 = 240$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Indikator}} \times 100 = \frac{147}{240} \times 100 = 61.25\%$$

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden Masyarakat Mengenai Indikator Pembagian Kerja pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 61.25% sehingga dapat dikatakan cukup baik dengan berada diantara 34-66%

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan pada indikator Pembagian Kerja, masih banyak masyarakat yang belum mempunyai KTP. Terbukti dengan pengelolaan produk layanan penerbitan KTP oleh Kecamatan Bagan Sinembah tahun 2018 belum optimal, hal ini dapat dilihat dari data 37.398 wajib KTP, hanya 7.796 atau 20,84% penduduk memiliki KTP.

Kemudian dari hasil wawancara dengan responden masyarakat, mengenai Indikator Pembagian Kerja. Dengan pertanyaan yaitu: apakah pembagian kerja dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan umum sudah baik? Kenapa masyarakat banyak yang tidak memiliki KTP? Masyarakat menjawab:

“saya kan cuma tamatan SD, sudah tua juga toh. Jadi untuk apa lagi mengurus KTP.” (Wawancara , Jam, Hari/Tanggal: 10.00 Wib, sabtu 3 Agustus 2019).

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat yang lainnya, mereka menjawab:

“saya sudah mengurus KTP, tetapi sampai sekarang belum selesai. Sudah 6 bulan. Tetapi ada yang baru mengurus hari itu juga langsung selesai. Nama nya org berduit. Urusan apa aja pasti cepat selesai. Sedangkan kami yang gratis ini pasti lama proses nya. Pegawai Kantor Camat nya pun ramah kalau dapat duit. Kalau kami yang miskin ini mengurus ini itu nggak pernah dilayani dengan baik”. (Wawancara , Jam, Hari/Tanggal: 10.00 Wib, sabtu 3 Agustus 2019).

Dari wawancara dengan responden masyarakat diatas, dapat dijelaskan bahwa indikator Pembagian Kerja yang terdiri dari empat item penilaian yaitu Pembagian Kerja dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Pelayanan Umum, Pembagian Kerja dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pelayanan Umum yang tidak berkompeten, Pelaksanan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi yang tidak berkompeten. Pembagian Kerja sangat lah berpengaruh dalam sebuah pelaksanaan suatu kegiatan/program. Karena Pembagian Kerja yang sesuai dengan keahllian/skill dan sesuai dengan job description akan berdampak juga pada kesuksesan Pelaksanaan suatu Kegiatan/program.

3. Komunikasi

Dari wawancara dengan responden masyarakat diatas, dapat dijelaskan bahwa indikator Pembagian Kerja yang terdiri dari empat item penilaian yaitu Pembagian Kerja dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Pelayanan Umum, Pembagian Kerja dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pelayanan Umum yang tidak berkompeten, Pelaksanan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi yang tidak berkompeten. Pembagian Kerja sangat lah berpengaruh dalam sebuah pelaksanaan suatu kegiatan/program. Karena Pembagian Kerja yang sesuai dengan keahllian/skill dan sesuai dengan job description akan berdampak juga pada kesuksesan Pelaksanaan suatu Kegiatan/program.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa yang berjumlah 34 orang responden dan 40 orang responden masyarakat terhadap indikator Komunikasi yang terdiri dari dua item penilaian yaitu sosialisasi mengenai pentingnya KTP kepada masyarakat, koordinasi camat dengan instansi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.11 : Tabel Skor Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Komunikasi pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

No	Komunikasi	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Sosialisasi mengenai pentingnya KTP kepada masyarakat	17	13	4	34
3.	Koordinasi Camat dengan instansi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	14	14	6	34

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Komunikasi dalam organisasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat dan pemahaman atas informasi dari suatu unit (pengirim) ke unit yang lain (penerima) tidak hanya vital dalam perumusan tujuan organisasi, tetapi juga merupakan peralatan dan sarana penting melalui kegiatan organisasi. Komunikasi adalah satu usaha praktek dalam mempersatukan pendapat-pendapat, ide-ide, persamaan pengertian dan persatuan kelompok. Proses komunikasi adalah bagaimana sang komunikator menyampaikan

pesan kepada komunikannya, sehingga dapat dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses Komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya). Sedangkan Koordinasi adalah kegiatan yang mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasi unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan. Koordinasi yang baik berasal dari komunikasi yang baik. Jika komunikasi berjalan dan terjalin dengan baik maka koordinasi akan berjalan dengan baik juga dan koordinasi dapat diterima oleh bawahan dengan senang hati.

Berikutnya hasil jawaban responden PerangkatKecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan KepalaDesaterhadap item penilaian di atas, Dari tabel V.II dapat dilihat bahwa pada indikator Komunika mengenai item penilaian sosialisasi mengenai pentingnya KTP kepada masyarakat, dari 34 orang responden yang menjawab baik 17 orang responden, 13 orang responden menjawab cukupbaik dan yang menjawab kurangbaik 4 orang responden.

Untuk item penilaian ketiga yaitu Koordinasi Camat dengan instansi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimana dari jumlah responden, 14 orang responden menanggapi Baik. 14 orang responden menanggapi Cukup Baik. Dan 6 orang responden menanggapi Kurang Baik.

Tabel V.11 : Analisis Jawaban Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Komunikasi pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

No	Komunikasi	Kategori Penilaian			Total
		Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
1.	Sosialisasi mengenai pentingnya KTP kepada masyarakat	51	26	4	81
2.	Koordinasi Camat dengan instansi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	42	28	6	76
Total Skor		93	54	10	157

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dan teknik perhitungan penelitian yang digunakan yaitu :

Skor tertinggi : $34 \times 3 = 102$

Skor Indikator : $102 \times 2 = 204$

$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Indikator}} \times 100 = \frac{157}{204} \times 100 = 76\%$

Sementara itu hasil dari wawancara dengan Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Ibu Sakinah, S.STP M.Si mengenai Komunikasi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Beliau menjawab:

“Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya KTP dan administrasi lainnya. Selain itu semua kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kami laksanakan juga kami beri penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat tahu manfaat kegiatan tersebut dan mau ikut berpartisipasi.” (Wawancara, Jam, Hari/Tanggal: 11.00 Wib, Kamis, 1 Agustus 2019).

Berdasarkan jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tanggapan dari dari responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa mengenai indikator Komunikasi yaitu “Baik”.

TabelV.12 : Tabel Skor Responden Masyarakat Mengenai Indikator Komunikasi pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

No	Komunikasi	KategoriPenilaian			Total
		Baik	CukupBai k	Kurang Baik	
1.	Sosialisasimengenai pen tingnya KTP kepadamasyarakat	2	15	23	40
2.	KoordinasiCamatdenga ninstansiterkaitpelaksa naankegiatanpemberda yaanmasyarakat	4	12	24	40

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Komunikasi dalam organisasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat dan pemahaman ata sinformasi darisuatu unit (pengirim) ke unit yang lain (penerima) tidakhanya vital dalam perumusan tujuan organisasi, tetapi juga merupakan peralatan dan sarana penting melalui kegiatan organisasi. Komunikasi adalah satu usaha praktek dalam mempersatukan pendapat-pendapat, ide-ide, persamaan pengertian dan persatuan kelompok. Proseskomunikasi adalah bagaimana sang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat dapat menciptakan suatu persamaan maknaantarakomunikan dengan komunikatornya. Proses Komunikasi ini

bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya). Sedangkan Koordinasi adalah kegiatan yang mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasi unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan. Koordinasi yang baik berasal dari komunikasi yang baik. Jika komunikasi berjalan dan terjalin dengan baik maka koordinasi akan berjalan dengan baik juga dan koordinasi dapat diterima oleh bawahan dengan senang hati.

Berikutnya hasil jawaban responden Masyarakat terhadap item penilaian di atas, dapat kita lihat bahwa untuk item penilaian sosialisasi mengenai pentingnya KTP kepada masyarakat dari jumlah responden masyarakat yaitu 40 orang responden, 2 orang responden menanggapi Baik. Kemudian 15 orang responden menanggapi Cukup Baik. Dan 23 Orang responden masyarakat yang menanggapi Kurang Baik..

Item penilaian selanjutnya yaitu Koordinasi Camat dengan instansi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimana 4 orang responden masyarakat menanggapi Baik. Kemudian 12 orang responden menanggapi Cukup Baik. Lalu 24 orang responden menanggapi Kurang Baik terhadap Koordinasi Camat dengan instansi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

TabelV.12 : Analisis Jawaban Responden Masyarakat Mengenai Indikator Komunikasi pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten RokanHilir.

No	Komunikasi	TolakUkur			Total
		Baik (3)	CukupBaik (2)	Kurang Baik (1)	
1.	Sosialisasi mengenai pentingnya KTP kepada masyarakat	6	30	23	59
3.	Koordinasi Camat dengan instansi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	12	24	24	60
Total Skor		18	54	47	119

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dan teknik perhitungan penelitian yang digunakan yaitu :

$$\text{Skor tertinggi} : 40 \times 3 = 120$$

$$\text{Skor Indikator} : 120 \times 2 = 240$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Indikator}} \times 100 = \frac{119}{240} \times 100 = 49.6\%$$

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden Masyarakat Mengenai Indikator Komunikasi pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 49.6% sehingga dapat dikatakan cukup baik dengan berada diantara 34-66%.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti terjun langsung ke lapangan, berdasarkan wawancara dengan masyarakat mengenai Indikator Komunikasi, dengan pertanyaan: apakah sosialisasi mengenai pentingnya KTP

sudah disampaikan oleh Kantor Camat Bagan Sinembah, Kepala Desa dan Tokoh masyarakat ? Masyarakat menjawab:

“Sosialisitentang KTP setausayatidakada. Kami mengurus KTP karenakebutuhanuntukpersyaratankredit motor. ” (Wawancara, Jam, Hari/Tanggal: 11.00 Wib, Sabtu 3 Agustus 2019).

“sayatidaktahu dan tidakpernahdengarmengenaiadanya program yang disebutkantadi.” (Wawancara, Jam, Hari/Tanggal: 11.00 Wib, Sabtu 3 Agustus 2019).

Kemudian menurut analisis jawaban responden responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa dan responden Masyarakat mengenai indikator Sumber Daya yang terdiri dari empat item penilaian yaitu sosialisasi mengenai pentingnya KTP kepada masyarakat, penyampaian informasi tentang program dari Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia, koordinasi camat dengan instansi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Koordinasi Kepala Desa dengan Camat apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. yaitu Baik sedangkan hasil analisis jawaban responden masyarakat yaitu Cukup Baik. Berdasarkan jawaban wawancara dengan masyarakat dan hasil tanggapan responden Panitia/Satgas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bagan Sinembah kurang optimal, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui program/kegiatan yang dilaksanakan.

4. Pertemuan

Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dapat diukur salah satunya dengan Indikator Pertemuan. Pertemuan merupakan rapat antar kelompok-kelompok untuk membahas dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Mengadakan pertemuan merupakan Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan Koordinasi. Dengan adanya pertemuan akan terhindar dari terjadinya kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

Kemudian untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Komunikasi pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 18 orang responden dan responden masyarakat yang berjumlah 40 orang responden terhadap indikator Pertemuan. Yang terdiri dari 4 item penilaian yaitu Camat mengumpulkan instansi terkait untuk membahas persoalan kegiatan pemberdayaan masyarakat, solusi yang dihasilkan dari pertemuan, langkah-langkah/strategi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Faktor Penghambat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.13 : Tabel Skor Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Pertemuan pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

No	Pertemuan	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Camat mengumpulkan instansi terkait untuk membahas persoalan kegiatan pemberdayaan masyarakat	23	5	6	34
2.	Langkah-langkah/strategi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di hasilkan dari pertemuan	25	7	2	34

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Pertemuan dapat dilaksanakan dalam bentuk Rapat. Pertemuan atau rapat adalah pertemuan atau kumpulan dalam suatu organisasi, perusahaan, instansi pemerintah baik dalam situasi formal maupun nonformal untuk membicarakan, merundingkan dan memutuskan suatu masalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama. rapat yang dilaksanakan untuk menemukan pemecahan tentang suatu masalah yang sedang dihadapi. Pada rapat ini peran peserta rapat sangat besar untuk memberikan masukan berupa saran atau pendapat yang akan disimpulkan bersama. Hasil kesimpulan yang telah disepakati tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dalam rapat ini, juga dapat melahirkan gagasan-gagasan baru yang inovatif dan kreatif, Melatih sikap kerja sama di antara para karyawan. Jika tidak ada rapat, biasanya karyawan hanya akan memikirkan dan mengurus pekerjaannya sendiri. Pertemuan atau rapat juga

merupakan ajang untuk menyampaikan masalah atau komplain tentang hal tertentu yang selama ini tidak bisa diungkapkan secara terbuka. Melalui rapat, pihak atasan berkesempatan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para bawahannya. Dan dalam pertemuan atau rapat bawahan juga membantu pihak atasan dalam mengambil keputusan yang bijak dan tepat. Sehingga dengan diadakannya pertemuan atau rapat semua kendala atau masalah yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai rencana (plan).

Berikutnya hasil jawaban responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa, Dari tabel V.13 dapat dilihat bahwa dari 34 orang responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa 23 orang responden menanggapi Baik, 5 orang menanggapi cukup baik dan 6 orang responden menanggapi kurang baik.

Item Penilaian kedua yaitu langkah-langkah/strategi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 25 orang responden menanggapi Baik. Lalu 7 orang responden menanggapi Cukup Baik. Dan 2 orang responden menanggapi Kurang Baik.

Tabel V.13 : Analisis Jawaban Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Pertemuan pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

No	Pertemuan	Kategori Penilaian			Total
		Baik (3)	Cukup Baik (2)	Kurang Baik (1)	
1.	camat mengumpulkan stansiterkait untuk mem bahas persoalan kegiatan pemberdayaan masyarakat	69	10	6	85
2.	langkah-langkah/strategi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	75	14	2	91
Total Skor		144	24	8	176

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dan teknik perhitungan penelitian yang digunakanyaitu :

$$\text{Skor tertinggi} : 34 \times 3 = 102$$

$$\text{Skor Indikator} : 102 \times 2 = 204$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Indikator}} \times 100 = \frac{176}{204} \times 100 = 86\%$$

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa Mengenai Indikator Pertemuan pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 86% sehingga dapat dikatakan baik jika berada antara 67-100%.

Sementara itu hasil dari wawancara dengan Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Ibu Sakinah, S.STP M.Si mengenai indikator Pertemuan

pada Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah, Beliau menjawab:

“untuk pertemuan selalu kita lakukan secara rutin, biasanya dilakukan setiap bulan pada minggu pertama di aula kantor Camat. Semua instansi terkait ikut dalam pertemuan. Didalam pertemuan biasanya kita membahas tentang progres pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan apa kendala yang dihadapi semuanya di bahas pada pertemuan tersebut.”
(Wawancara, Jam, Hari/Tanggal: 11.00 Wib, Kamis , 1 Agustus 2019)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Suka Maju, yaitu bapak Usman. Dengan pertanyaan apakah kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat mendapatkan solusi dari pertemuan yang di lakukan di aula Kantor Camat, beliau menjawab:

“iya pertemuan memang dilakuakn setia awal bulan, tetapi untuk kendala yang disampaikan tidak semua nya di tanggapi danmendapat solusi. Jadi ya mau gimana lagi seolah-olah yakita harus berusaha sendiri untu desa kita kalau mau maju.”(Wawancara, Jam, Hari/Tanggal: 11.00 Wib, Senin , 5 Agustus 2019)

Berdasarkan jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terlaksana dengan Baik.

TabelV.14 : Tabel Skor Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pertemuan pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

No	Pertemuan	KategoriPenilaian			Total
		Baik	CukupBai k	Kurang Baik	
1.	camatmengumpulkanin stansiterkaituntukmem bahaspersoalankegiatan pemberdayaanmasyara kat	3	28	9	40
2.	langkah- langkah/strategidalamp elaksanaankegiatanpem berdayaanmasyarakat	7	31	2	40

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Pertemuan dapat dilaksanakan dalam bentuk Rapat. Pertemuan atau rapat adalah pertemuan atau. Kumpulan dalam suatu organisasi, perusahaan, instansi pemerintah baik dalam situasi formal maupun nonformal untuk membicarakan, merundingkan dan memutuskan suatu masalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama.rapat yang dilaksanakan untuk menemukan pemecahan tentang suatu masalah yang sedang dihadapi. Pada rapat ini peran peserta rapat sangat besar untuk memberikan masukan berupa saran atau pendapat yang akan disimpulkan bersama. Hasil kesimpulan yang telah disepakati tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.Dalam rapat ini, juga dapat Melahirkan gagasan-gagasan baru yang inovatif dan kreatif, Melatih sikap kerja sama di antara para karyawan. Jika tidak ada rapat, biasanya karyawan hanya akan memikirkan dan mengurus pekerjaannya sendiri. Pertemuan atau rapat juga merupakan ajang untuk menyampaikan masalah atau komplain tentang hal

tertentu yang selama ini tidak bisa diungkapkan secara terbuka. Melalui rapat, pihak atasan berkesempatan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para bawahannya. Dan dalam pertemuan atau rapat bawahan juga Membantu pihak atasan dalam mengambil keputusan yang bijak dan tepat. Sehingga dengan diadakannya pertemuan atau rapat semua kendala atau masalah yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai rencana (plan).

Berikutnya hasil jawaban responden masyarakat Pada tabel V.14a dapat dilihat bahwa dari 40 responden masyarakat pada item penilaian pertama yaitu camat mengumpulkan instansi terkait untuk membahas persoalan kegiatan pemberdayaan masyarakat 17 responden menanggapi Baik. Selanjutnya 28 responden masyarakat menanggapi Cukup Baik. 9 responden menanggapi Kurang Baik.

Item penilaian ketiga yaitu langkah-langkah/strategi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dari jumlah responden masyarakat, 7 responden menanggapi Baik. Selanjutnya 31 orang responden menanggapi Cukup Baik. Berikutnya 2 orang responden masyarakat menanggapi Kurang Baik.

TabelV.14 : Analisis Jawaban Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pertemuan pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

No	Pertemuan	KategoriPenilaian			Total
		Baik (3)	CukupBai k (2)	Kurang Baik (1)	
1.	camatmengumpulkanin stansiterkaituntukmem bahaspersoalankegiatan pemberdayaanmasyara kat	9	56	9	74
2.	langkah- langkah/strategidalamp elaksanaankegiatanpem berdayaanmasyarakat	21	62	2	85
Jumlah		30	118	11	159

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dan teknik perhitungan penelitian yang digunakanyaitu :

$$\text{Skortertinggi} : 40 \times 3 = 120$$

$$\text{SkorIndikator} : 120 \times 2 = 240$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Indikator}} \times 100 = \frac{159}{240} \times 100 = 66.25\%$$

Berdasarkan hasilanal isi jawaban responden Masyarakat Mengenai Indikator Pertemuan pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilirsebanyak 66.25% sehingga dapat dikategorikan cukup baik karena berada pada rentang 34-66%

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Pertemuanya itu pertemuan memang benar dilakukan setiap bulan pada minggu pertama, hanya menurut peneliti pertemuan yang dilakukan belum efektif dan

efisien karena tujuan pertemuan yaitu untuk membicarakan dan mendiskusikan hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jika ada kendala yang di hadapi dapat dicari solusinya bersama-sama didalam pertemuan tersebut.

Tabel V.15 : Rekapitulasi Jawaban Responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

No	Variabel	Indikator	Presentase
1	Koordinasi	Perencanaan	50%
2		Pembagian Kerja	50%
3		Komunikasi	76%
4		Pertemuan	86%
Total			262%
Rata-Rata			65,5%

Sumber: Olahan Data Hasil Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel V.15, yang menjelaskan hasil rekapitulasi jawaban dari responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dapat disimpulkan masuk dalam kategori Baik sesuai dengan penjelasan di atas tentang persentase sebesar 34-66% masuk pada kategori "Cukup Baik", artinya belum semua indikator terlaksana dengan baik.

Pada indikator Perencanaan, berdasarkan hasil analisis jawaban responden

Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa item penilaian yang berada pada interval Cukup Baik yaitu item penilaian Sarana dan prasarana dalam perencanaan, Sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan oleh semua pesertakegiatan.

Untuk indikator Pembagian Kerja, berdasarkan hasil analisis jawaban responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa semua item penilaian berjalan dengan baik.

Sedangkan untuk indikator Komunikasi, pada indikator ini item penilaian yang Terlaksana dengan baik yaitu sosialisasi mengenai pentingnya KTP kepada masyarakat. Sedangkan Item Penilaian yang Kurang Baik pelaksanaannya yaitu Koordinasi Kepala Desa dengan Camat apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian untuk indikator Pertemuan, berdasarkan hasil analisis jawaban responden Perangkat Kecamatan, Ketua LPM Sekecamatan dan Kepala Desa, Item Penilaian yang Terlaksana dengan Baik yaitu camat mengumpulkan instansi terkait untuk membahas persoalan kegiatan pemberdayaan masyarakat, solusi yang dihasilkan dari pertemuan, dan langkah-langkah/strategi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan item penilaian yang Kurang Baik dalam pelaksanaannya yaitu Faktor Penghambat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

TabelV.16 : Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

No	Variabel	Indikator	Persentase
1	Koordinasi	Perencanaan	49.6%
2		PembagianKerja	61.25%
3		Komunikasi	49.6%
4		Pertemuan	66.25%
Total			226.70%
Rata-Rata			56.68%

Sumber: *Olahan Data Hasil Penelitian Tahun 2019*

Berdasarkan tabel V.16, yang menjelaskan hasil rekapitulasi jawaban dari responden Masyarakat pada Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan total presentase 226.70% yang berada pada rata-rata 56.68%. Dimana pada rate tersebut tersebut yaitu berkategori “Cukup Baik”. Artinya semua indikator belum terlaksana dengan baik.

. Pada indikator Perencanaan, berdasarkan hasil analisis jawaban responden Masyarakat item penilaian yang Terlaksana dengan Baik yaitu item penilaian Sarana dan prasarana dalam perencanaan. Sedangkan Item Penilaian yang Kurang Baik dalam pelaksanaannya yaitu Sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan oleh semua peserta kegiatan.

Untuk indikator Pembagian Kerja, berdasarkan hasil analisis jawaban responden Masyarakat item penilaian yang terlaksana dengan Baik yaitu Pembagian Kerja dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi. Sedangkan Item Penilaian yang Kurang Baik dalam pelaksanaannya yaitu Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pelayanan Umum

yang tidak berkompeten.

Sedangkan untuk indikator Komunikasi, pada indikator ini berdasarkan hasil analisis jawaban responden Masyarakat item penilaian yang Baik dalam pelaksanaannya yaitu Koordinasi Camat dengan instansi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Item Penilaian yang Kurang Baik yaitu Koordinasi Kepala Desa dengan Camat apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Untuk indikator Pertemuan, berdasarkan hasil analisis jawaban responden Masyarakat, Item Penilaian yang Baik pelaksanaannya yaitucamat mengumpulkan instansi terkait untuk membahas persoalan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Item Penilaian yang Kurang Baik dalam pelaksanaannya yaitu langkah-langkah/strategi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian Menurut observasi dilapangan, masih Cukup Baik nya Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir juga dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap Program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ini disebabkan banyak masyarakat yang belum mengetahui info kegiatan apa saja yang dilakukan kecamatan Bagan Sinembah dalam Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah kurang terlaksana dengan optimal.

Pada indikator Perencanaan, berdasarkan observasi peneliti dilapangan “Cukup Baik” karena Perencanaan mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat

di rencanakan setiap awal tahun dan di dalam perencanaan sealulu mengikut serta kan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh agama.

Untuk indikator Pembagian Kerja, Peneliti menilai masih “Kurang Baik” karena pada indikator ini seharusnya kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan pelayanan umum dapat terlaksana dengan baik. Karena seperti yang kita ketahui ekonomi merupakan hal yang paling mendasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat tidak sejahtera otomatis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan bisa dikatakan tidak berhasil. Dan koordinasi camat antar pihak terkait juga di pertanyakan. Apa penyebab tidak keberhasilan itu. Dan bantuan kegiatan/ program mini demplot yakni proyek percontohan pertanian di lahan gambut dengan sistem pengelolaan tanpa bakar seharusnya juga dapat dimanfaatkan camat dalam mengurangi kebakaran lahan. Yang mana seperti kita ketahui kebakaran lahan di Riau setiap tahunnya meningkat. Salah satu penyumbang kebakaran lahan di Riau yaitu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Dengan adanya kebakaran lahan itu dapat menimbulkan masalah baru dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Hak masyarakat untuk menghirup udara yang bebas dari polusi tidak terpenuhi. Penyakit pun menyerang masyarakat. Kemudian pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan umum mestinya harus di benahi lagi. Agar masyarakat yang memiliki KTP meningkat. Karena KTP merupakan kartu identitas yang harus dimiliki oleh semua warga negara Indonesia yang sudah berumur 17. Selain itu KTP juga banyak kegunaan dan manfaatnya untuk masyarakat. Oleh karena itu Pembagian Kerja pada pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan masyarakat seharusnya dapat di bagi oleh camat secara jelas dan terstruktur sesuai dengan keahlian, dan spesialisasi.

Sedangkan untuk indikator Komunikasi, pada indikator ini peneliti menilai masih “Kurang Baik” karena pada indikator ini berhubungan dengan indikator pembagian kerja. Seharusnya camat dapat berkoordinasi dengan baik dan menjalin hubungan yang lebih baik lagi kepada para bawahan dan instansi terkait pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena koordinasi yang baik nantinya akan terhindar dari mis communication. Dan pemberian informasi mengenai kegiatan apa saja yang dilaksanakan di kecamatan Bagan Sinembah hendaknya di infokan kepada masyarakat secara jelas. Dapat dilakukan dengan secara sosialisasi dan pemasangan baliho sehingga dapat dibaca oleh semua masyarakat.

Kemudian untuk indikator Pertemuan, peneliti menilai masih “Cukup Baik” karena pada indikator ini peneliti melihat bahwa pertemuan dilakukan secara rutin setiap bulannya pada minggu pertama. Hanya saja hasil pertemuan tidak sesuai dengan harapan. Banyak yang tidak di bahas di dalam pertemuan. Dan kendala yang beragam yang dihadapi oleh setiap desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat jarang mendapat titik penyelesaiannya.

Dari penjelasan mengenai observasi peneliti di lapangan berdasarkan perindikator, maka dapat disimpulkan Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir “Cukup Baik”.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Koordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Cukup Baik. Dalam rangka untuk mendapatkan keberhasilan pelaksanaan koordinasi disini peneliti menggunakan beberapa tolak ukur yang menjadi acuan berlangsungnya Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hillir, diantaranya yaitu : Perencanaan, Pembagian Kerja, Komunikasi, Pertemuan.

Menurut observasi peneliti di lapangan, dapat di simpulkan bahwa indikator penilaian yang dalam pelaksanaannya Cukup Baik yaitu Pada indikator Perencanaan, karena Perencanaan mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat di rencanakan setiap awal tahun dan di dalam perencanaan sealulu mengikutsertakan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh agama. Selanjutnya indikator Penilaian yang Kurang Baik dalam pelaksanaannya yaitu indikator Komunikasi, karena pada indikator ini berhubungan dengan indikator pembagian kerja. Seharusnya Camat dapat berkoordinasi dengan baik dan menjalin hubungan

yang lebih baik lagi kepada para bawahan dan instansi terkait pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena koordinasi yang baik nantinya akan terhindar dari mis communication. Dan pemberian informasi mengenai kegiatan apa saja yang dilaksanakan di kecamatan Bagan Sinembah hendaknya di infokan kepada masyarakat secara jelas. Dapat dilakukan dengan secara sosialisasi dan pemasangan baliho sehingga dapat dibaca oleh semua masyarakat.

C. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian yaitu antara lain:

1. Koordinasi antara instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat hendaknya lebih baik lagi agar terjalin komunikasi yang baik sehingga terjalin kerja sama yang baik antara camat, kepala desa, LPM, dan tokoh agama dll.
2. Memberikan informasi mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat seharusnya lebih jelas lagi. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan sosialisasi, pemasangan baliho dan pengumuman dengan menggunakan pengeras suara yang di pasang di mobil. Sehingga mobil bisa keliling ke desa-desa terpencil untuk menyampaikan informasi tersebut.
3. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya memiliki KTP dan mempermudah masyarakat yang mau mengurus KTP tanpa adanya pungli.

4. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang arti pentingnya menjaga lahan tanpa bakar. Dan menjelaskan sebab akibat yang akan di hadapi bila pembakaran lahan dilakukan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Literature

- Ali, Faried. 2013. Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefenisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Ambar, Sulistyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Grahailmu
- Brantas, 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta
- Edy, Sutrisno. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ke Enam. Jakarta: Pranada Media Group
- Fathoni, Aburrahmat, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Hamim, Sufian. 2003. Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan. Pekanbaru: UirPerss
- Hasibuan, Malayu S.P., 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Melayu. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta. CV. Haji Mas Agung.
- Manullang, 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Mardikanto, Toto. Dan Soebianto, Poerok. 2012. Pemberdayaan masyarakat dalam Prespektif kebijakan publik. Bandung: Cv. Alfabeta
- Marnis. 2008. Pengantar Manajemen. Pekanbaru: Unri Press
- Marnis. 2009. Pengantar Manajemen. Pekanbaru: PT Panca Abdi Nurgama
- Siagian, Sondang. P 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta: Bumi Aksara
- Sjamsiar, Sjamsudin. 2006. Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik. Malang. Agritek YPN.
- Sudikin dan Darmadi, Damai. 2011. Adminitrasi publik. Laks Bang. Yogyakarta.
- Suetomo. 2011. Pemberdayaan masyarakat, mungkinkah muncul anitesisnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Superjandan EPRI. 2003. Pengembangan masyarakat dan pengembangan pemberdayaan. Yogyakarta: Aditia Media
- Syafiie, Inu Kencana. 2016. Sitem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta: PT BumiAksara.
- Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga
- Tangkilisan. 2004. Kebjiakan dan Manajemen Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Thoha, Miftah. 2014. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Ero Reformasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Torang, Syamsir. 2013. Organisasi Dan Manajemen. Alfabeta. Bandung.
- Torang, Syamsir. 2013. Organisasi dan Manajemen. Bandung: Alfabeta
- Westa, Pariata. 2005. Pokok-Pokok Pengerian manajemen. Jakarta: GunungAgung.
- Wursanto. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Andy: Yogyakarta
- Zulkifli, dan Nurmasari. 2015. Pengantar Manajemen. Pekanbaru: MarpoyanTujuh Publishing
- Zulkifli. 2005. Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen. Pekanbaru: UIR
- Zulkifli. 2009. Fungsi-fungsi manajemen. Pekanbaru: MarpoyanTujuh.

Dokumentasi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat
3. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsidan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten RokanHilir.